

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
PADA SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF  
MENGENAI DESAIN FESYEN BUSANA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:  
**ELA NOVITA SARI**  
**NPM: 1421030015**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H/ 2018 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
PADA SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF  
MENGENAI DESAIN FESYEN BUSANA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**Oleh:  
ELA NOVITA SARI  
NPM: 1421030015**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Frenki, S.E.I., M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H/ 2018 M**



## ABSTRAK

Subsektor Ekonomi Kreatif mengenai desain fesyen busana yang didorong pemerintah Indonesia untuk terus berkembang mengalami kendala dalam aspek hukum hak kekayaan intelektual terutama dalam bidang hak cipta. Pelanggaran hak cipta yang terjadi seperti logo dari Butik Rabbani yang dibajak oleh pelanggar menjadikan bukti akan keresahan pihak yang dirugikan yaitu Butik Rabbani. Produk yang banyak ditiru yaitu jilbab sekolah, alasan meniru karena konsumen banyak meminati produk tersebut, sehingga para pelanggar berinisiatif mengambil keuntungan sepihak. Menurut ketentuan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual angka (2) yaitu, *HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*. Sedangkan dalam hukum positif, pembuatan desain pakaian muslimah dan desain pakaian non muslimah dilindungi oleh hak cipta dan desain industri karena mengandung hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi.

Kedua aspek di atas menimbulkan permasalahan tentang respon dari pandangan Islam mengenai hukum penciptaan desain pakaian non muslimah (yang tidak sesuai syariat Islam salah satunya yaitu yang tidak menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan). Dari hal tersebut pula muncul permasalahan mengenai perbedaan perlindungan atas pandangan hukum Islam apabila terjadi pelanggaran antara produk pakaian muslimah dan produk pakaian non muslimah yang terdaftar sebagai hak cipta atau desain industri. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, yaitu untuk mengetahui konstruksi Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Tujuan yang kedua, yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum subsektor ekonomi kreatif fesyen desain busana dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan sistem perhitungan dan tidak menggunakan data angka. Penelitian ini penulis lakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sehingga, menghasilkan temuan yang diperoleh dari beragam sarana seperti Al-Qur'an, Hadits, buku-buku dan jurnal yang terkait dengan Hak Cipta dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, penelitian ini berdasarkan teori dari Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Konstruksi Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yaitu Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak atas Merek, dan Hak Cipta. Dalam Fatwa MUI tersebut, subsektor ekonomi kreatif desain fesyen busana muslimah seperti yang dipasarkan oleh Butik Rabbani sangat dilindungi, apabila perlindungan tersebut dilanggar maka perbuatan pelanggar di golongkan perbuatan haram. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pembajakan produk yang dialami Butik Rabbani semestinya tidak terjadi lagi.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol.H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

**Nama Mahasiswa : Ela Novita Sari**

**NPM : 1421030015**

**Jurusan : Muamalah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA SUBSEKTOR  
EKONOMI KREATIF MENGENAI DESAIN FESYEN  
BUSANA**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Siti Mahmudah, S. Ag., M. Ag.  
NIP.196706041997032004**

**Pembimbing II**

**Frenki, S.E.I., M.Si.  
NIP. 198003152009011017**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Dr. H. A. Khumaldi Ja'far, S. Ag., M.H.  
NIP: 1956120519830310**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol.H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF MENGENAI DESAIN FESYEN BUSANA**, yang telah di susun oleh **Ela Novita Sari, NPM: 1421030015**, Jurusan: **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at, 29 Juni 2018**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)**

**Penguji I : Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. (.....)**

**Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, M.Ag. (.....)**

**Dekan**

**Fakultas Syariah**



**Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 197009011997031002**



## MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا  
فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. Ar- Ra'd (13): 11.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan yang selalu menyayangi setiap detik hidup saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi, bertepatan pula dengan selesai studi strata 1 di UIN Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan, dan dengan bangga pula saya persembahkan karya ilmiah ini, kepada:

1. Ibu Mastianah, melalui beliau proses 21 tahun ini saya jalani, tulisan ini ada karena ketangguhan beliau. Ayah Alfian R, yang relung hatinya sangat bangga apapun keadaan penulis.
2. Adik saya Aldi Alfiko, yang memang pantas jadi adik penulis, namun terkadang berperan sebagai kakak lelaki penulis.
3. Pembimbing skripsi penulis yaitu Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag., yang telah banyak memberikan pelajaran dan wawasan. Bapak Frenki, S.E.I., M.Si., yang telah membimbing dengan baik prestasi akademik penulis sampai menyelesaikan studi.

Raja Basa, 17 April 2018

Penulis

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ela Novita Sari, biasa dipanggil di bangku formal dengan sebutan Ela atau *Mbak El*, jika dalam keluarga besar dan tetangga biasa memanggil Nila.

Penulis lahir di Palembang pada tanggal 01 November 1996 (21 tahun), anak pertama dari dua bersaudara pasangan suami istri sah Bapak Alfian R dan Ibu Mastianah.

Pendidikan penulis bermula di SD N 1 Muara Cawang, Tanjung Sakti, Pagar Alam Sumatera Selatan pada tahun 2002-2004, lalu pindah ke SDN 2 Indra Putra Subing Terbanggi Besar Lampung tengah pada tahun 2004-2008, kemudian melanjutkan ke SMP N 5 Terbanggi Besar Lampung Tengah lulus pada tahun 2011. Tak lelah menapaki pendidikan, penulis melanjutkan kembali studi ke SMK N 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah dengan mengambil jurusan Perbankan dan menerima ijazah pada tahun 2014. Meskipun sejak kecil sangat minim pengetahuan agama Islam, penulis bertekad kuat melanjutkan langsung pendidikan kejenjang perguruan tinggi Islam yaitu IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung dan diterima di Fakultas Syari'ah Jurusan Mumalah pada tahun 2014 melalui jalur Online (undangan/prestasi), sehingga sangat bersyukur telah lulus pada Juni tahun 2018.

Pengalaman selama menuntut ilmu sangat berkesan bagi penulis, sejak SD kelas V, penulis sudah berani tampil didepan umum sebagai pembaca UUD 1945 atau pemegang teks Pancasila yang berdiri tegak di samping Pembina upacara

pada saat upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih yang berlangsung setiap hari Senin. Kemudian, sejak SMP penulis senang sekali berkompetisi, kompetisi yang pernah diikuti yaitu lomba membuat dan membaca puisi tingkat sekolah SMP, Alhamdulillah mendapat juara 2.

Pada saat SMK, penulis sering menguji mental mengikuti lomba *speech*, karena selama SMK penulis mengikuti pengembangan diri *English Club*. Saat Penulis duduk di kelas XI, penulis mendapat kesempatan mengikuti kurikulum SMK yaitu Praktik Kerja Industri, Alhamdulillah mendapat tempat di PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yang berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah Lampung, penulis mengasah pengalaman selama 3 bulan di bagian *Customor Service* dan bagian Administrasi Kredit Pegawai Negeri Sipil.

UIN Raden Intan Lampung selain salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia yang menerapkan tridarma perguruan tinggi, juga merupakan tempat berproses mengembangkan diri, semenjak semester I- VIII penulis mengikuti Komunitas Minat Baca Mahasiswa Lampung. Semester IV-VIII penulis mengikuti Komunitas Mata Pena Fakultas Syariah yang bergerak dalam dunia tulis-menulis sastra, opini, dan jurnalistik, baik diberdayakan di Media Online Fakultas maupun di Media Online MUI (Majelis Ulama Indonesia) Lampung. Penulis di amanahi sebagai Ketua Devisi Sastra di komunitas tersebut, di samping itu penulis berperan juga sebagai wartawan. Sejak mengikuti komunitas MataPena, penulis terpacu untuk bercita-cita jadi penulis, menemukan arti bakat, dan pastinya menemukan kenyamanan, bertemu dengan orang-orang yang di muliakan Allah SWT, merupakan hal yang sangat penulis syukuri.

Melalui Komunitas MataPena yang terus memotivasi untuk selalu berprestasi, penulis menguji kemampuan menulis puisi di tingkat nasional sebanyak 2 kali, Alhamdulillah kedua percobaan menulis itu berhasil menjadi karya terpilih dan terbaik yang kemudian di bukukan dan diterbitkan oleh pihak penyelenggara lomba yaitu Azizah Publising.

Semester VI penulis mengikuti Komunitas Gen-BI (Generasi Baru Indonesia) yaitu komunitas nasional penerima beasiswa Bank Indonesia pada setiap perguruan tinggi negeri di Indonesia, merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam hal pengembangan diri yang jauh lebih baik, dengan diberi bimbingan langsung oleh pihak Bank Indonesia menyadarkan penulis bahwa kesempatan dan keberuntungan itu ada dan berharga. Selain itu, terdapatnya program-program yang disusun langsung oleh anggota Gen-BI maupun kesediaan Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap anggota Gen-BI untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang di selenggarakan Bank Indonesia menjadikan diri pribadi penulis untuk terus berproses. Dan segala puji bagi Allah, atas segala nikmat yang telah berikan kepada penulis.

Raja Basa, 29 Januari 2018

Penulis



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF MENGENAI DESAIN FESYEN BUSANA” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, dan merupakan Penguji I Penulis yang telah memberikan arahan;
3. Drs. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;

5. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah.
7. Frenki, S.E.I., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah berkontribusi sebagai pembimbing akademik selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan;
9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
10. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkah penulis serta doa yang tak pernah henti dihaturkan dalam setiap sujud mereka.
11. Adik tercinta Aldi Alfiko yang selalu semangat mengembangkan diri.
12. Keluarga besar, sebagai pelengkap hidup penulis.
13. Sahabat Mata Pena Fakultas Syariah (Nure, Ria, Zu, Dewi, Rizki, Pare, Rae, Heni), Pembimbing Mata Pena Bapak Abdul Qadir Zaelani, M.Ag., dan Bapak Rudi Santoso, M.H., dari mereka penulis mulai mengindahkan sebuah mimpi dan aksi.
14. Teman-teman Gen-BI (Generasi Baru Indonesia), selama 1 tahun bersama penulis mencari pengalaman dan berproses di bawah naungan lembaga independen Negara yaitu Bank Indonesia yang selalu menyadarkan hidup ini penuh kesempatan dan keberuntungan.
15. Teman-teman KMBM-L (Komunitas Minat Baca Mahasiswa Lampung).

16. Teman-teman HMJ MU (Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah).
17. Teman-teman Muamah D 2014.
18. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang setiap tahap kurikulumnya menyadarkan penulis bahwa hidup ini perlu belajar baik di tempat formal maupun di dalam masyarakat.
19. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 17 April 2018  
Penulis

Ela Novita Sari  
1421030015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBABAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II HAK CIPTA dan FATWA MUI .....</b>	<b>17</b>
A. Hak Milik.....	17
B. Hak Kekayaan Intelektual .....	26
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	26
2. Hubungan Hak Kekayaan Intelektual dengan Ekonomi Kreatif.....	31
C. Hak Cipta.....	50
1. Pengertian Hak Cipta.....	50
2. Saat Lahir Hak Cipta .....	53
3. Ciptaan yang Dilindungi.....	53
4. Pendaftaran Hak Cipta.....	54
5. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta .....	60
D. Fatwa MUI No . 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 .....	66
<b>BAB III EKONOMI KREATIF, PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA, dan CONTOH KASUS PELANGGARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Ekonomi Kreatif.....	82
1. Pengertian Ekonomi Kreatif .....	82
2. Sejarah Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia .....	87
3. Subsektor Ekonomi Kreatif di Indonesia.....	89
B. Subsektor Ekonomi Kreatif Fesyen .....	95

1. Pengertian Fesyen dan Desain .....	96
2. Pengertian Busana Muslimah dan Busana Non Muslimah.....	99
C. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	104
1. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik.....	104
2. Tugas Penyidik.....	108
3. Penyelesaian Sengketa.....	116
D. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta Desain Fesyen.....	132
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>138</b>
A. Konstruksi Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 .....	138
B. Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap Perlindungan Hak Cipta pada Subsektor Ekonomi Kreatif Desain Fesyen Busana....	147
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>156</b>
A. Kesimpulan .....	156
B. Saran.....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULIAN**

### **A. Penegasan Judul**

Penegasan dengan memberi pengertian yang terkandung dalam judul perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan atau kerancuan persepsi dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul, **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF MENGENAI DESAIN FESYEN BUSANA”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup> Perlindungan adalah tempat berlindung.<sup>2</sup> Hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan dalam ajaran agama Islam, baik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, peraturan yang ditetapkan oleh mujtahid tentang boleh tidaknya sesuatu itu dikerjakan oleh orang yang telah baligh dan berakal.<sup>3</sup> Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan).<sup>4</sup> Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), h.58.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.830.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.342.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.474.

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Ekonomi kreatif adalah suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.<sup>6</sup> Desain adalah kerangka bentuk.<sup>7</sup> Fesyen adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.<sup>8</sup> Busana adalah pakaian.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini mengenai hukum islam meninjau perlindungan hak cipta pada subsektor ekonomi kreatif desain fesyen busana.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa hal menarik, sehingga memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul ini, yaitu:

### **1. Alasan Obyektif**

Alasan obyektif yang membuat penulis tertarik untuk memilih dan membahas judul ini, yaitu:

---

<sup>5</sup> UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia* (www.nulisbuku.com, 2016), h.8.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.319.

<sup>8</sup> Departemen Perdagangan RI, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008), h.2.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.229.

- a. Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk dari globalisasi adalah Hak atas Kekayaan Intelektualitas (HKI) yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia (*creative capital*). Siapa yang memilih ide dan wawasan yang unik dapat memproteksi idenya itu dan menghalangi orang lain menggunakannya. Ide bisa didaftarkan sebagai paten, hak cipta, merk dan desain. Di jaman ini ide bukan lagi hal yang bisa dianggap remeh. Subsektor ekonomi kreatif fesyen terkait dengan kreasi desain fesyen tepatnya pembuatan busana muslimah dan busana non muslimah tentunya mengedepankan kreativitas, inovasi, dan penemuan baru dari penciptanya, sehingga dikatakan sebagai ekonomi kreatif. Dalam hukum Islam telah ditentukan bagaimana hukum berpakaian bagi muslimah, salah satunya dari Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat (59:33) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>10</sup>

Selain itu didalam fatwa MUI telah ditentukan bahwa HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1

<sup>10</sup> Q.S. al- Ahzab (33): 59.



tersebut adalah “*HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*”<sup>11</sup>

Sehingga, terkait dengan itu timbul pertanyaan bagaimana perbedaan perlindungan hukum dalam membuat busana non muslimah dan busana muslimah.”

- b. Karena penulis menginginkan pengetahuan yang utuh tentang pentingnya mengetahui bagaimana perbedaan hukum membuat pakaian muslimah dan pakaian non muslimah di era Indonesia yang menggencarkan pengembangan ekonomi kreatif ini.

## 2. Alasan Subyektif

Alasan subyektif yang membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini di antaranya:

- a. Pokok bahan dalam penulisan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari pada Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syariah).
- b. Terkait dengan judul dan tema penelitian, ini merupakan hal baru, tema yang diangkat baru pula, karena mengangkat aspek hukum ekonomi kreatif, belum pernah dilakukan penelitian di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung oleh peneliti sebelumnya, dan ini akan menjadi penelitian baru, sehingga layak untuk diteliti.

---

<sup>11</sup> Ma’ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), pembahasan ke 37, h.471.

## B. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam telah ditentukan bagaimana hukum berpakaian bagi muslimah, berpakaian yang tidak ketat, yang tidak menerawang dan yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sebuah pakaian tidak akan menjadi pakaian jika tidak ada pembuat atau penciptanya, dan jika tidak diciptakan tidak akan menjadi suatu alternatif dalam menggunakan pakaian, baik jenis pakaian muslimah atau jenis pakaian non muslimah.

Fesyen atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *fashion* merupakan salah satu bidang dalam industri kreatif yang keberadaannya sedang berkembang di Indonesia. Dalam industri kreatif sangat syarat dengan kreativitas dan inovasi. Banyak desainer yang menciptakan desain-desain *fashion* yang menarik serta diminati banyak kalangan. Desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda, misalnya busana. Desain dari sebuah *fashion* merupakan hasil ide dan kreativitas dari seorang desainer yang patut dilindungi dan dihargai. Terlindunginya ekspresi ide dan kreativitas manusia dapat menumbuhkan semangat untuk selalu menciptakan hal-hal baru yang bahkan sangat bermanfaat bagi kemajuan peradaban.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual angka (2) yaitu, *HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*<sup>13</sup> Pembuat desain pakaian muslimah dan desain pakaian non muslimah dilindungi oleh hak cipta dan desain

---

<sup>12</sup> Fihatul Aidiyah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2013), h.Abstrak.

<sup>13</sup> Ma'ruf Amin, *Op.Cit.*, h.471.

industri karena mengandung hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Sehingga muncul pertanyaan tentang bagaimana pandangan Islam mengenai penciptaan desain pakaian non muslim (yang tidak sesuai syariat Islam salah satunya yaitu yang tidak menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan).

Adapun menurut Muhammad Sa'id al-'Asymawi, yang di muat dalam buku Dr. Siti Mahmudah yaitu *Historisitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abd. Al-Karim*, menyatakan bahwa Syariat adalah aturan, jalan, cara atau metode dan proses yang bersumber dari Al-Qur'an dalam menciptakan hukum untuk setiap umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, secara terus menerus mengikuti perkembangan konteks yang ada tanpa membekukan hukum itu sendiri. Muhammad Sa'id al-'Asymawi menegaskan bahwa syariat Islam merupakan prinsip-prinsip kemaslahatan untuk melakukan suatu kebajikan yang berkelanjutan dalam menciptakan aturan-aturan baru, melakukan pembaruan-pembaruan dan interpretasi sehingga tidak membeku ke dalam aturan formal atau interpretasi baku. Syariat Islam yang lebih mengedepankan kemaslahatan bagi kehidupan kemanusiaan inilah yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern.<sup>14</sup>

Perlu ditegaskan bahwa, subsektor ekonomi kreatif fesyen yang berkaitan dengan kreasi desain fesyen tepatnya pembuatan pakaian non muslimah dan pakaian muslimah tentunya mengedepankan kreativitas, inovasi, dan penemuan baru dari penciptanya, sehingga dikatakan sebagai ekonomi kreatif. Dalam hukum

---

<sup>14</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abd. Al-Karim* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), h.3.

Islam telah ditentukan bagaimana hukum berpakaian bagi muslimah, sehingga timbul pertanyaan jika dikaitkan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, penjelasan atas perbedaan perlindungan hukum dalam membuat pakaian non muslimah dan pakaian muslimah perlu dicari penguraiannya, karena pembuatan pakaian baik pakaian muslimah maupun pakaian non muslimah merupakan salah satu kegiatan yang membutuhkan ide kreatif dan *skill* sehingga menghasilkan pakaian yang memiliki nilai jual (nilai ekonomi) dan banyak diterapkan di masyarakat Indonesia.

Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk dari globalisasi adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia (*creative capital*). Siapa yang memilih ide dan wawasan yang unik dapat memproteksi idenya itu dan menghalangi orang lain menggunakannya. Ide bisa didaftarkan sebagai paten, hak cipta, merk dan desain. Di jaman ini ide bukan lagi hal yang bisa dianggap remeh. Hal ini dapat dilihat dari pendaftaran paten di Direktorat Jendral Hak Cipta yang relatif terus meningkat tetapi peningkatan ini lebih disebabkan oleh peningkatan registrasi paten asing yang jauh lebih banyak dibandingkan registrasi paten lokal. Tujuan perusahaan asing meregistrasi paten sebanyak-banyaknya di Indonesia adalah untuk melindungi kepentingan bisnisnya yang pada akhirnya yang bermotivasi ekonomi. Mereka tidak mau produk, paten, merk dan desain mereka dibajak dan dieksploitasi oleh orang lain. Industri kreatif adalah penghasil *creative capital*. Dengan merangsang industri kreatif di Indonesia, industri-industri lokal bisa mengurangi ketergantungan industri manufaktur dalam hal pembayaran lisensi-

lisensi terhadap produk asing.<sup>15</sup> Sehingga, dalam ekonomi kreatif mengandung hak atas kekayaan intelektual yang perlu di lindungi oleh pemerintah. Seperti hak cipta pada iklan, hak paten pada seni pertunjukan, atau hak merek dan hak cipta pada fesyen.

Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan. Kondisi ekonomi yang diharapkan oleh Indonesia adalah ekonomi yang berkelanjutan dan juga memiliki beberapa sektor sebagai pilar maupun penopang kegiatan ekonomi di Indonesia. Keberlanjutan yang dimaksud adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap kondisi geografis dan tantangan ekonomi baru, yang pada akhirnya menghasilkan keberlanjutan pertumbuhan (*sustainable growth*). Pertumbuhan yang tinggi tercermin dari kompetensi individu-individu dalam menciptakan inovasi. Ekonomi Kreatif yang di dalamnya terdapat industri-industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi di dalam ekonomi berkelanjutan karena individu-individunya memiliki modal kreativitas (*creative capital*) yang mereka gunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk pengembangan perekonomian di Indonesia. Yang mana, Indonesia bisa mengembangkan model ide dan talenta dari rakyat untuk dapat menginovasi dan menciptakan suatu hal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Perdagangan RI, *Op.Cit.*, h.35.

<sup>16</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Op.Cit.*, h.10-11.

Negara-negara membangun kompetensi ekonomi kreatif dengan caranya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada pada negara tersebut. Ada beberapa arah dari pengembangan industri kreatif ini, seperti pengembangan yang lebih menitik beratkan pada industri berbasis: (1) Lapangan usaha kreatif dan budaya (*creative cultural industry*); (2) Lapangan usaha kreatif (*creative industry*); (3) Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright industry*).<sup>17</sup>

Ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.<sup>18</sup> Sub ekonomi kreatif yaitu, periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan.<sup>19</sup>

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup pula program komputer.<sup>20</sup> Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah *intellectual property Right*. Istilah tersebut merupakan satu rangkaian kata *intellectual* dan *property*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum di mana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemiliknya. Kata *intellectual* berkaitan

---

<sup>17</sup> Departemen Perdagangan RI, *Op.Cit.*, h.1.

<sup>18</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Op.Cit.*, h.8.

<sup>19</sup> Departemen Perdagangan RI, *Op.Cit.*, h.16-17.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, h.58.

dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagaimana benda immaterial.<sup>21</sup>

Dengan demikian *intellectual property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum. Dan dengan demikian *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni. Didalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) yang tidak berwujud.<sup>22</sup>

Dasar hukum dalam Al-Qur'an Surat Ar- Ra'd ayat (13:11) mengenai kreativitas, inovasi, dan penemuan dalam Islam.

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta, FH UII Press, Cet.II, 2014), h.423.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Q.S. ar-Ra'd (13): 11.

Pentingnya kreativitas untuk kejayaan Islam sangat perlu, dan pandangan hukum ekonomi Islam melalui Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pembuatan pakaian muslimah dan pakaian non muslimah perlu dilihat perbedaannya secara mendalam, karena kehidupan manusia tidak terlepas dari pakaian yang ia kenakan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konstruksi Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta pada Subsektor Ekonomi Kreatif Fesyen Desain Busana dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan sehingga penulis melakukan penelitian ini. Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005.
- b. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Cipta pada Subsektor Ekonomi Kreatif Fesyen Desain Busana dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.



## 2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini di antaranya:

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- 1.) Memberikan informasi tentang hukum menciptakan busana muslim dan busana non-muslim.
- 2.) Memberikan kontribusi secara ilmiah terhadap pengembangan ekonomi kreatif mengenai desain fesyen busana muslimah dan non-muslimah, khususnya melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

### b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- 1.) Penelitian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai penambahan wacana yang berkaitan dengan masalah hukum Islam dan dapat menjadi landasan positif bagi masyarakat.
- 2.) Bagi penulis sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wacana dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah terutama terhadap kajian ilmu hukum Islam.

## E. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan sistem perhitungan dan tidak menggunakan data angka. Penelitian ini penulis lakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library*

*Research*). Sehingga, menghasilkan temuan yang diperoleh dari beragam sarana seperti Al-Qur'an, Hadits, Buku-buku yang terkait dengan HKI dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, penelitian yang berasal dari berbagai literatur ini tergolong penelitian kepustakaan yang berdasarkan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*)<sup>24</sup> yaitu penelitian yang difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya terhadap masalah yang dibahas, yaitu Al-Quran, hadits, buku tentang ekonomi kreatif, buku tentang hak kekayaan intelektual, fatwa MUI, buku-buku fiqh muslimah, dan Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual yang berlaku, yang menjelaskan tentang perlindungan hukum pengembangan subsektor ekonomi kreatif.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik<sup>25</sup> yaitu penelitian memaparkan secara sistematis materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang subsektor ekonomi kreatif mengenai desain fesyen busana muslimah dan busana non muslimah yang di analisis melalui Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>24</sup> Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.53.

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.45.

Dalam penelitian *Library Research* sehingga menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif.<sup>26</sup> Dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku, atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau di dapat dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier.

- a. Sumber Data Primer, adalah sumber data<sup>27</sup> atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah yakni kitab, buku atau literatur asli dalam hal ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Fatwa MUI, Undang-Undang, buku fiqh muslimah yang membahas tentang subsektor Ekonomi Kreatif desain fashion busana muslimah dan non-muslimah.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.<sup>28</sup> Dalam hal ini adalah data pendukung seperti pendapat para ulama serta referensi lainnya yang membahas tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.
- c. Sumber Data Tersier, adalah merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia bibliografi dan indeks yang dalam hal ini adalah kamus hukum yang memiliki hubungan emosi atau substansi.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h.75.

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.121.

<sup>28</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), h.26.

#### 4. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>29</sup> Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Editing Data: pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi Data: mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- c. Verifikasi Data: mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.
- d. Sistematikasi Data: menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah

#### 5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode berpikir induktif, karena proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h.199.

sebagai yang terdapat dalam data, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, dan analisis demikian dapat memperthitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagaian dari struktur analitik.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.4.

## **BAB II**

### **HAK CIPTA dan FATWA MUI**

#### **A. HAK MILIK**

Kepemilikan merupakan bagian penting dalam pembahasan ekonomi Islam. Dalam konsep Islam, Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya. Dia pencipta bumi dengan segala isinya termasuk manusia. Setelah Allah menciptakan bumi, lalu Allah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk menjaga eksistensinya dalam kehidupan, seperti oksigen, air, ataupun tumbuh-tumbuhan. Manusia diperkenankan untuk mengambil bagian dari fasilitas yang disediakan Allah tersebut. Setiap manusia yang hidup di atas bumi, mempunyai hak yang tidak dapat diganggu dan dihalangi oleh orang lain, yaitu hak untuk mencukupi segala kebutuhan pokok hidupnya. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencarinya, namun hasil yang didapatkan tentunya akan berbeda bergantung kepada usaha dan kesungguhan yang dilakukan dalam bekerja.<sup>1</sup>

Manusia tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan air, menggerakkan awan, dan membuat minyak bumi. Manusia hanya mampu untuk mengolah, memperdayakan, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang telah diciptakan Allah. Manusia hanya bisa mengubah dan mempersiapkan segala sesuatu itu agar bisa diakses manusia dan bermanfaat bagi kehidupannya. Semua harta kekayaan yang ada di bumi merupakan milik Allah. Kepemilikan manusia

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.193.

datang kemudian. Oleh karena itu, kepemilikan manusia tidak bisa menghapus kepemilikan Allah yang abadi.<sup>2</sup> Hal tersebut antara lain dapat dipahami dari firman Allah dalam surah Thaaha (20): 6, yang berbunyi:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

Artinya: “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.”<sup>3</sup>

Pemberdayaan manusia atas segala fasilitas kehidupan bukan berarti dapat menafikan kepemilikan Allah yang hakiki atas aset-aset tersebut, dan juga tidak bisa dipahami bahwa kepemilikan atas harta benda berpindah dari Allah menjadi milik manusia. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati dan memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik mutlak. Kepemilikan manusia hanya merupakan pengganti atau wakil Allah di atas bumi. Untuk itu, atas harta kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia harus dibelanjakan demi pengabdian terhadap kesejahteraan dan ketenteraman kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Ketika membicarakan tentang kepemilikan maka pada saat yang sama juga memperbincangkan tentang hak, mengingat kepemilikan berarti hak yang diperoleh oleh seseorang atas sesuatu. Secara bahasa, dalam Al-Qur'an kata *hak* berarti milik, ketetapan, kepastian, dan kebenaran. Secara terminologi hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan. Kepemilikan merupakan izin As-Syari' (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Q.S. Thaaha (20): 6.

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h.194-195.

Syari' (Allah swt) terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, dan karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi, kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah swt untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian kepemilikan adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak menurut syara' yang diberikan kepada seseorang.<sup>5</sup>

Pengertian secara umum hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Adapun hak didefinisikan sebagai kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.<sup>6</sup> Hak yang dijelaskan tersebut, adakalanya merupakan *sulthah*, adakalanya merupakan *taklif*.<sup>7</sup>

- a. *Sulthah* terbagi dua, yaitu *sulthah 'ala al nafsi* yaitu hak seseorang terhadap jiwa, seperti hak *hadlanah* (pemeliharaan anak). Kemudian *sulthah 'ala syai'in mu'ayanin* yaitu hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.32-33.

<sup>7</sup> *Ibid.*



- b. *Taklif* adalah orang yang bertanggung jawab, *taklif* adakalanya tanggungan pribadi (‘*ahdah syakhshiyah*) seperti seorang buruh menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta (‘*ahdah maliyah*) seperti membayar utang.

Para fuqaha berpendapat bahwa hak merupakan imbalan dari benda (*a'yan*), sedang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak adalah bukan harta (*ina al-haqqa laisa hi al-mal*). Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak *mal* (sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang) dan hak *ghair mal* yang di bagi dua yaitu:<sup>8</sup>

- a. *Hak Syakhshi* (Suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain).
- b. *Hak 'Aini* (Hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak 'aini ada dua macam yang pertama hak 'aini *ashli* yaitu adanya wujud benda tertentu dan adanya *shahub al-haq* seperti hak *milkiyaj* dan hak *irtifaq*. Yang kedua hak 'aini *thab'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka *murtahin* berhak menahan barang itu. *Macam-macam hak 'aini ialah sebagai berikut:*<sup>9</sup>

- 1) *Haq Al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskan, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

- 2) *Haq Al-intifa'* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Haq al-Isti'mal* (mengggunakan) terpisah dari *haq al Istighal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si *mauquf 'alaih* hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- 3) *Haq Al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dari slokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawah Tuan Ahmad dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.
- 4) *Haq Al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Rahn* menimbulkan hak 'aini bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena *rahn* hanyalah jaminan belaka.
- 5) *Haq Al-ihtibas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda luqathah.
- 6) *Haq Qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf ialah:
  1. *Haq al-hakr* ialah hak menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizing hakim.

2. *Haq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena ada akad ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizing hakim, atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.

3. *Haq al-qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa.

4. *Haq al-marshad* ialah hak mengawasi atau mengontrol.

7) *Haq Al-murur* adalah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.

8) *Haq Ta'alli* adalah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.

9) *Haq Al-jiwar* ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik *uqar* dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.

10) *Haq Syafah* atau *haq syurb* adalah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.

Istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu *milk*. Dalam kamus *Almunjid* dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan *milk* (yang berakar dari kata kerja *malaka*) adalah *malkan*, *milkan*, *malakatan*, *mamlakatan*, *mamlkatan*, dan *mamlukatan*. Milik dalam *lughah* (arti bahasa) dapat diartikan

*memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.* Menurut istilah, milik dapat di definisikan, “Suatu ikhtisas yang *menghalangi* yang lain, menurut syariat, yang membenarkan pemilik ikhtisan itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada *penghalang*. Kata *menghalangi* dalam definisi tersebut maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang atau mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sebaliknya, pengertian *penghalang* adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.<sup>10</sup>

Milik dalam buku *Fiqh Muamalah* didefinisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i. apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut: seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya, pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampuannya. Dengan kata lain dapat dikatakan “tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h.6.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.33-34.

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>12</sup>

*a. Milk tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.<sup>13</sup>

Dalam literatur lain disebut juga sebagai milik yang sempurna, yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.<sup>14</sup>

*b. Milk naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya. Milik *naqish* yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik *raqabah*, sedangkan milik *naqish* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara *i'arah*, wakaf, dan washiyah.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.40.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). h.67.

Dilihat dari segi *mahal* (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>15</sup>

- a. *Milk al'ain* atau disebut pula *milk al raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil, dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut *milk al-'ain*.
- b. *Milk al-manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.
- c. *Milk al-dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dari segi *shurah* (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Milk al-mutamayyiz*, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain. Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.
- b. *Milk al-syai'* atau *milkal-musya*, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsiikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.40-41.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.41.

Dalam literatur lain, *al- milku al naqish* disebut juga milik yang tidak sempurna, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam meminjam.<sup>17</sup>

## **B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Hak (*right*) adalah tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain yang membuat pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sesuai hukum yang berlaku). Hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku. Hak diartikan juga sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>18</sup> Kekayaan Intelektual adalah hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud.<sup>19</sup>

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah *intellectual property right*. Istilah *intellectual property* merupakan satu rangkaian kata *intellectual* (berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta

---

<sup>17</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h.68.

<sup>18</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.32.

<sup>19</sup> H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.9.

dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagaimana benda immaterial) dan *property* (dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum dimana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa seizing pemiliknya).<sup>20</sup>

Dengan demikian *intellectual property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum. Dan dengan demikian *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni. Didalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) yang tidak berwujud.<sup>21</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak<sup>22</sup>, hati, dan kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar<sup>23</sup>. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud kita ambil contoh misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal,

---

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta, FH UII Press, Cet.II, 2014), h.423.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Otak yang dimaksudkan bukanlah otak yang kita lihat seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya 2% dari total berat tubuh, tetapi otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan; kiri dan kanan. *Ibid.*, h.9.

<sup>23</sup> Kata “menalar” ini penting, sebab menurut penelitian pakar antropologi fisik di Jepang, seekor monyet juga berpikir, tetapi pikirannya tidak menalar. Ia tidak dapat menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. *Ibid.*, h.9.



menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses informasi secara simultan.<sup>24</sup> Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut kaum intelektual.<sup>25</sup> Begitulah, ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil. Hak milik atas benda berwujud.<sup>26</sup> Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistik, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri.<sup>27</sup> Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.10.

<sup>25</sup> Kalau kaum intelektual ini kemudian menjalankan pengetahuan yang dirumuskannya sebagai kebenaran itu dan mengabdikan kepada kepentingan manusia, ia disebut pula kaum cendekiawan. Seringkali kita menemukan istilah jika terjadi suatu peristiwa kemasyarakatan, orang menanyakan siapa pelaku (dader) intelektualnya. Kata intelektual menunjukkan "kaum pemikir" dibalik peristiwa tersebut. *Ibid.*, h.10.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.<sup>28</sup>

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Dari Hak Cipta dapat diturunkan lagi Hak Kaitan (*Neighbouring Rights*). Contoh Hak Kaitan adalah sinetron dari suatu buku novel, siaran televisi dari suatu drama, atau lagu. Dalam hal ini, buku novel, drama, ataupun lagu adalah Hak Cipta (Hak Asli), sedangkan sinetron, drama televisi, dan lagu yang ditayangkan itu adalah Hak Kaitan.<sup>29</sup>

Menurut WIPO, HKI biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Hak Cipta (*copyright*)
- b. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*)

Khusus menyangkut hak atas kekayaan industri, menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet II, 2007), h.4.

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, h.424.

yang telah direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober Tahun 1979 (Konvensi Paris), perlindungan hukum kekayaan industry meliputi:<sup>31</sup>

- a. Paten (*Patent*)
- b. Paten Sederhana (*Utility Models*)
- c. Hak Desain Industri (*Industrial Design*)
- d. Hak Merek
  - 1) Merek Dagang (*Trade Mark*)
  - 2) Jasa Dagang (*servicemarks*)
- e. Nama Perusahaan (*Tradenames*)
- f. Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*)

Para pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, di samping yang sudah dituliskan di atas, memasukkan pula beberapa hak lain, yaitu Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*). Dengan demikian, klasifikasi Hak Milik Perindustrian menurut sistem hukum *Anglo Saxon* meliputi:<sup>32</sup>

- a. *Patent*
- b. *Utility Model*
- c. *Industrial Design*
- d. *Trade Secret*
- e. *Trade Mark*

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.5.

- f. *Service Mark*
- g. *Trade Nam or Commercial Name*
- h. *Applation of Original*
- i. *Indication of Original*
- j. *Unfair Competition Protection*

*Word Trade Organization* (WTO), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) menambah dua bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak di atas, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Perlindungan Varietas Tanaman (Varieties of Plants Protection)*
- b. *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit)*

## **2. Hubungan HaK Kekayaan Intelektual dengan Ekonomi Kreatif**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang dijemlakan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau Invensi. Ciptaan atau Invensi tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt). Hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan Ciptaan atau Invensi baru.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.5.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.11.

Kemampuan berpikir makin meningkat dan berkembang apabila seseorang atau suatu bangsa dididik dan dilatih melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang terus-menerus, baik secara formal maupun informal. Salah satu indikator kemampuan berpikir yang makin meningkat dan berkembang itu adalah jumlah Ciptaan atau Invensi yang dihasilkan. Banyak nya jumlah Ciptaan atau Invensi yang dihasilkan membuktikan maju dan tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Jumlah Ciptaan atau Invensi itu dapat diketahui dan dibuktikan melalui data statistic Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang diakui dan terdaftar, baik yang berskala nasional maupun internasional. Secara ringkas tahap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga melahirkan Hak Kekayaan Intelektual dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Tahap Pengetahuan (Berupa daya cipta untuk menghasilkan suatu ide).
- b. Tahap Pemahaman (Berupa kemampuan merekonstruksi suatu ide menjadi kerangka gambaran karya cipta).
- c. Tahap Penerapan (Berupa kemampuan menjelmakan kerangka gambaran karya cipta menjadi suatu Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan seni atau Invensi di bidang teknologi. Ciptaan atau Invensi merupakan kekayaan yang bersumber dari intelektual seseorang yang di atasnya melekat suatu hak yang disebut Hak Kekayaan Intelektual).

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.12.

- d. Tahap Keberhasilan Penerapan (Berupa jumlah Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan seni atau jumlah Inovasi di bidang teknologi sebagai jelmaan Hak Kekayaan Intelektual).
- e. Tahap Pemanfaatan (Berupa penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melalui usaha sendiri atau pemberian lisensi penggunaan kepada pihak lain, secara nasional atau internasional untuk memperoleh keuntungan ekonomi).
- f. Tahap Pengembangan (Berupa kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengalaman di dalam atau di luar negeri guna menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual yang lebih banyak dan bermutu).

Akan tetapi, pertumbuhan dan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terkesan lambat dan terbelakang dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya terutama di lingkungan negara-negara ASEAN. Walaupun belum didukung oleh data yang pasti, berdasarkan pengamatan sementara, hal ini terutama disebabkan oleh paling sedikit tiga alasan, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara sempurna dan utuh sehingga tidak mampu merekonstruksi ide dan menjelmakannya menjadi kerangka Ciptaan atau Inovasi.
- b. Kurangnya penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pengembangan Ciptaan atau Inovasi yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan bidang industri dan perdagangan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.12-13.

- c. Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak menjamin perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang ada dan ini merupakan hambatan pengembangan Ciptaan atau Invensi baru.

Untuk meningkatkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditempuh berbagai upaya, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri dengan cara mendatangkan para ahli dari negara maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan.
- b. Mengirimkan tenaga kerja (sumber daya manusia) ke negara maju untuk dididik dan dilatih di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan.
- c. Memberi beasiswa kepada mahasiswa untuk belajar di negara-negara yang ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah maju.
- d. Ahli teknologi dalam rangka penanaman modal asing.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan penelitian dengan fasilitas sarana dan biaya yang cukup.

Upaya menghasilkan Ciptaan atau Invensi dapat pula dilakukan dengan cara memodifikasi Ciptaan atau Invensi yang sudah ada. Hasil modifikasi tersebut kemudian didaftarkan untuk memperoleh pengakuan sebagai Hak Cipta baru atau Paten baru. Sebagai contoh adalah Ciptaan atau Invensi berikut ini.<sup>38</sup>

- a. Novel (Hak Cipta asal) dimodifikasi menjadi sinetron (Hak Cipta Kaitan).

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.13-14.

- b. Mangkuk merah (Hak Cipta asal) dimodifikasi menjadi cap mangkuk merah merek suatu produk (Hak Cipta Kaitan).
- c. Paku lurus tajam (Paten asal) dimodifikasi menjadi paku lurus dengan skrup yang daya tancapnya lebih kuat (Paten baru).

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan immaterial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk industri tertentu. Nilai tinggi atau mahal itu dikaitkan dengan mutu atau kualitas produk tersebut di mata konsumen. Kualitas tinggi suatu produk ditandai oleh Merek Terkenal yang melekat pada barang dagangan. Merek Terkenal adalah Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi sumber kekayaan material pemiliknya. Salah satu Merek Terkenal adalah Coca-Cola. Dimana-mana orang minum Coca-Cola sehingga volume penjualan produk Coca-Cola makin meningkat. Ini berarti jumlah keuntungan yang diperoleh makin banyak.<sup>39</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sumber kekayaan material bagi pemiliknya karena mempunyai nilai ekonomi. Dalam kegiatan industri dan perdagangan, keuntungan ekonomi tidak hanya dapat dinikmati oleh pemilik, tetapi juga oleh pihak lain. Cara memperoleh keuntungan ekonomi tersebut, antara lain, sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Hak Kekayaan Intelektual digunakan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu bagi pemiliknya sendiri, misalnya, Merek Dagang/Jasa.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.14.

<sup>40</sup> *Ibid.*



- b. Hak kekayaan Intelektual diwujudkan dalam bentuk Model dan Rancang Bangun suatu produk industri kemudian dipasarkan kepada para konsumen, misalnya, karya arsitektur dan bangunan rumah.
- c. Hak Kekayaan Intelektual dialihkan penggunaan/pemanfaatannya kepada pihak lain melalui lisensi (izin) sehingga pemilik memperoleh keuntungan ganda, dari penggunaan sendiri dan dari lisensi, misalnya, Hak Cipta dilisensikan kepada Produser, Hak Merek dilisensikan kepada perusahaan perdagangan, Paten dilisensikan kepada perusahaan industri.

Nilai ekonomi tersebut mendorong ilmuwan untuk berpikir terus-menerus guna menghasilkan Ciptaan atau Invensi baru yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Makin meningkat kemampuan berpikir dan mencipta, makin bertambah jumlah Hak Kekayaan Intelektual dan ini berarti makin banyak menghasilkan keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomitersebut bukan hanya diperoleh pemilik, melainkan juga oleh pihak pemegang lisensi. Dari segi ekonomi, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual mendasari perkembangan industry yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa pendapatan nasional suatu negara (*Growth National Product*).<sup>41</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan basis industri modern. Dikatakan basis karena Hak Kekayaan Intelektual menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada Invensi baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan berstandar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi, dan dapat menghasilkan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.15.

keuntungan besar. Hal ini berlawanan dengan industri tradisional yang bersumber pada Inovasi tradisional, teknologi sederhana, kualitas rendah, dan tidak ada standar mutu. Industri tradisional sulit berkembang dan hanya dapat menembus pasar tradisional (lokal), tetapi sulit menembus pasar modern karena produk yang dihasilkan tidak bermutu standar. Dengan demikian, makin tinggi tingkat kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan makin maju perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dan makin cepat perkembangan industri modern.<sup>42</sup>

Perkembangan industri modern juga dapat bersumber pada lisensi Paten. Melalui lisensi Paten, industri dapat berkembang di dalam negeri dan kenegaraan lain (mancanegara). Berdasarkan lisensi Paten, Hak Kekayaan Intelektual menjadi sumber kekayaan materiil bagi pemilik dalam bentuk imbalan royalti. Sedangkan bagi pemegang lisensi Paten, Hak Kekayaan Intelektual merupakan sumber keuntungan ekonomi karena ikut serta memproduksi dan/atau memasarkan produk kepada konsumen. Contoh lisensi Paten adalah *Franchise of Kentucky Fried Chicken* dan *Franchise of McDonald*.<sup>43</sup>

Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan basis perdagangan modern. Dikatakan basis karena Hak Kekayaan Intelektual menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang menggunakan Merek Terkenal sebagai *goodwill*, lambang kualitas dan standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, diperdagangkan dengan jaminan, guna menghasilkan keuntungan besar. Di samping itu, perdagangan modern juga menggunakan manajemen terpadu

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.16.

<sup>43</sup> *Ibid.*

sehingga dapat menekan risiko sekecil mungkin untuk dengan harapan keuntungan sebesar mungkin. Kemampuan manajemen perusahaan secara terpadu menghasilkan pengalaman berharga di bidang teknologi, administrasi bisnis, pemasaran, dan pelayanan yang dapat mendatangkan keuntungan yang diharapkan sehingga menjadi rahasia perusahaan yang sangat berharga.<sup>44</sup>

Perdagangan barang Merek Terkenal dapat juga dikembangkan melalui lisensi Merek sehingga dapat menembus pasar dalam dan luar negeri dalam volume besar. Berdasarkan lisensi Merek Terkenal, Hak Kekayaan Intelektual merupakan sumber kekayaan material bagi pemilik dalam bentuk imbalan royalti, sedangkan bagi pemegang lisensi Merek merupakan sumber keuntungan ekonomi karena ikut serta memasarkan barang Merek Terkenal kepada konsumen, Contoh Lisensi Merek:

- a. Untuk perusahaan kemeja *Crocodile Trade Mark Licence*
- b. Untuk perusahaan minuman *Coca-Cola Trade Mark Licence*
- c. Untuk Perusahaan makanan *McDonald's Trade Mark Licence*

Kekuatan nasional suatu negara bergantung juga pada kemajuan dan kemampuan menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju (*developed countries*) sejak sebelum perang Dunia II. Jerman di Eropa dan Jepang di Asia sejak sbelum Perang Dunia II telah mempersiapkan diri menjadi negara kuat (*superpower*) dengan mengandalkan strategi utama, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika ingin menjadi negara *superpower*, kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

sumber Ciptaan dan Invensi Hak Kekayaan Intelektual. Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah dibuktikan oleh Jerman dan Jepang hingga meletuskan Perang Dunia II.<sup>45</sup>

Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diteruskan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II terutama Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya, termasuk juga Jepang di Asia sebagai negara kalah perang. Berdasarkan pengalaman sejarah, mereka menyadari benar arti penting Hak Kekayaan Intelektual sebagai sumber kekuatan politik berbasis ekonomi. Jepang yang hancur karena bom atom menyadari benar arti penting ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam kurun waktu relative singkat telah menghasilkan Invenisi-invenisi baru sebagai basis pertumbuhan dan pengembangan industry dan perdagangan yang menguasai pasar global sehingga Jepang dapat bangkit sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.<sup>46</sup>

Aspek hukum hak kekayaan Intelektual bermula dari hasil kemampuan berpikir (*daya cipta*). Hasil kemampuan berpikir tersebut berupa ide hanya dimiliki oleh Pencipta atau Inventor secara khusus (*exclusive*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Ciptaan atau Invenisi. Ciptaan atau Invenisi adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang berasal dari akal (intelektual) pemiliknya sehingga disebut Hak Kekayaan Intelektual.<sup>47</sup>

Hak Kekayaan Intelektual hanya akan mempunyai arti ekonomi apabila diijelmakan oleh pemiliknya dalam bentuk Ciptaan atau Invenisi untuk dapat

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.17.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.17-18.

dinikmati oleh pengguna. Di samping itu, pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dapat juga dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi sehingga Ciptaan atau Investasi itu dapat dinikmati oleh konsumen dalam lingkup kawasan yang lebih luas secara nasional dan/atau internasional. Lisensi adalah pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual seseorang.<sup>48</sup>

Bersumber dari Ciptaan atau Invensi ini kemudian timbul hak milik material atas Ciptaan atau Invensi dan Hak Kekayaan Intelektual yang melekat pada Ciptaan atau Invensi. Terhadap hak milik tersebut, undang-undang member kebebasan kepada pemilik untuk memetik manfaat, mengembangkan, memelihara, mengalihkan, atau bahkan memusnahkannya. Pemilik dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain. Apabila pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain, menurut hukum pengalihan tersebut dilakukan dengan lisensi (pemberian izin) dan lisensi tersebut harus didaftarkan.<sup>49</sup>

Dalam lisensi ditentukan hak dan kewajiban pokok pihak-pihak. Pemilik mengalihkan pemanfaatan kepada penerima lisensi dengan menerima royalti, sedangkan pemegang lisensi membayar royalti dengan menerima keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam lisensi ditentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang lisensi. Hak Kekayaan Intelektual dapat juga beralih/dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, atau cara lain yang diakui oleh undang-undang. Dengan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

demikian, Hak Kekayaan Intelektual bersumber pada dua jenis hubungan hukum, yaitu hubungan hukum karena ketentuan undang-undang dan karena perjanjian antara pemilik hak dan penerima hak. Pembentuk undang-undang mengatur Hak Kekayaan Intelektual mengingat arti pentingnya sebagai kekayaan yang bernilai ekonomi bagi pemiliknya yang patut dilindungi.<sup>50</sup>

Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk dari globalisasi adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia (*creative capital*). Siapa yang memilih ide dan wawasan yang unik dapat memproteksi idenya itu dan menghalangi orang lain menggunakannya. Ide bisa didaftarkan sebagai paten, hak cipta, merk dan desain. Di jaman ini ide bukan lagi hal yang bisa dianggap remeh. Hal ini dapat dilihat dari pendaftaran paten di Direktorat Jendral Hak Cipta yang relatif terus meningkat tetapi peningkatan ini lebih disebabkan oleh peningkatan registrasi paten asing yang jauh lebih banyak dibandingkan registrasi paten lokal. Tujuan perusahaan asing meregistrasi paten sebanyak-banyaknya di Indonesia adalah untuk melindungi kepentingan bisnisnya yang pada akhirnya yang bermotifasi ekonomi. Mereka tidak mau produk, paten, merk dan desain mereka dibajak dan dieksploitasi oleh orang lain. Industri kreatif adalah penghasil *creative capital*. Dengan merangsang industri kreatif di Indonesia, industri-industri lokal bisa mengurangi ketergantungan industri manufaktur dalam hal pembayaran lisensi-lisensi terhadap produk asing.<sup>51</sup> Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Departemen Perdagangan RI, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008), h.35.

*engineering* dan ilmu telekomunikasi. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan. Kondisi ekonomi yang diharapkan oleh Indonesia adalah ekonomi yang berkelanjutan dan juga memiliki beberapa sektor sebagai pilar maupun penopang kegiatan ekonomi di Indonesia. Keberlanjutan yang dimaksud adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap kondisi geografis dan tantangan ekonomi baru, yang pada akhirnya menghasilkan keberlanjutan pertumbuhan (*sustainable growth*). Pertumbuhan yang tinggi tercermin dari kompetensi individu-individu dalam menciptakan inovasi. Ekonomi Kreatif yang di dalamnya terdapat industri-industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi di dalam ekonomi berkelanjutan karena individu-individunya memiliki modal kreativitas (*creative capital*) yang mereka gunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk pengembangan perekonomian di Indonesia. Yang mana, Indonesia bisa mengembangkan model ide dan talenta dari rakyat untuk dapat menginovasi dan menciptakan suatu hal.<sup>52</sup>

Negara-negara membangun kompetensi ekonomi kreatif dengan caranya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada pada negara tersebut. Ada beberapa arah dari pengembangan industri kreatif ini, seperti pengembangan yang lebih menitik beratkan pada industri berbasis: (1) Lapangan usaha kreatif dan budaya (*creative cultural industry*); (2) Lapangan usaha kreatif (*creative industry*); (3) Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright industry*).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia* (www.nulisbuku.com, 2016), h.10-11.

<sup>53</sup> Departemen Perdagangan RI, *Op.Cit.*, h.1.



Ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.<sup>54</sup> Sub ekonomi kreatif yaitu, periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan.<sup>55</sup>

Fesyen atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *fashion* merupakan salah satu bidang dalam industri kreatif yang keberadaannya sedang berkembang di Indonesia. Dalam industri kreatif sangat syarat dengan kreativitas dan inovasi. Banyak desainer yang menciptakan desain-desain *fashion* yang menarik serta diminati banyak kalangan. Desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda, misalnya busana. Desain dari sebuah *fashion* merupakan hasil ide dan kreatifitas dari seorang desainer yang patut dilindungi dan dihargai.<sup>56</sup>

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran kaitannya dengan hasil karya *fashion* diantaranya dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pendesain sebagai pencipta hasil karya mempunyai hak eksklusif untuk melarang orang lain menjiplak hasil karyanya.<sup>57</sup>

Dewasa ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan telah diakui baik dalam tataran nasional, regional, maupun internasional. HKI juga turut

---

<sup>54</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Op.Cit.*, h.8.

<sup>55</sup> Departemen Perdagangan RI, *Op.Cit.*, h.16-17.

<sup>56</sup> Fihatul Aidiyah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2013), h.abstrak

<sup>57</sup> *Ibid.*



mempengaruhi pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai salah satu Negara peserta (*contracting state*) WTO telah terikat untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasionalnya sehingga sesuai dengan perjanjian perdagangan tersebut. Lebih jauh lagi Indonesia pun dituntut untuk secara konsisten menegakkan aturan-aturan yang telah disepakatinya itu.<sup>58</sup>

Perkembangan HKI saat ini tidak dapat dipisahkan dari organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang secara resmi menggantikan GATT sejak tanggal 1 Januari 1995 berdasar hasil kesepakatan *Uruguay Round* tahun 1994. Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik di forum nasional maupun internasional, dimasukkannya *TRIPs* dalam paket persetujuan WTO pada tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Kondisi saat ini terjadi ketidak seimbangan dalam penerapan dan penegakan hukum dalam bidang HKI itu sendiri. Dalam satu sisi, pemerintah dituntut untuk melakukan proteksi terhadap hak-hak intelektual, namun dalam satu sisi masyarakat kurang memperdulikan sehingga seringkali sebuah karya diklaim pihak lain, yang sebenarnya tidak berhak. Industri kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual (*intellectual property*) menjadi nilai ekonomi tinggi yang tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h.1.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h.2.

Industri yang diyakini memiliki ketahanan atas terjadinya krisis keuangan global ini adalah apa yang dikenal dengan industri kreatif. Membicarakan industri kreatif sangat berhubungan erat dengan perlindungan kekayaan intelektual. Dalam industri kreatif sangat syarat dengan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi ini dikenal dengan kekayaan intelektual. Mengingat dalam industri kreatif syarat dengan kekayaan intelektual, maka menjadi absolute jika kekayaan intelektual yang dimiliki industri kreatif sebelum dieksploitasi mendapatkan perlindungan dari segi hukum terlebih dahulu.<sup>60</sup>

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebuah desain fesyen dalam industri kreatif bisa mencakup desain industri dan hak cipta.<sup>61</sup> Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup pula program komputer.<sup>62</sup> Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah *intellectual property Right*. Istilah tersebut merupakan satu rangkaian kata *intellectual* dan *property*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum di mana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemiliknya. Kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagaimana benda immaterial.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, h.58.

<sup>63</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, h.433.

Kaitan antara desain *fashion* (fesyen) terhadap perlindungan hak cipta dan desain industri adalah bahwa desain dari sebuah fesyen merupakan hasil ide dan kreatifitas dari seorang desainer yang patut dilindungi dan dihargai. Desain fesyen terutama pada kain batik serta kebaya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang salah satunya yaitu seni batik dan kebaya. Penciptaan desain dalam fesyen layak untuk dilindungi hak ciptanya karena sistem HKI yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan diantara dua kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum.<sup>64</sup>

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta. Bila dikaitkan dengan perlindungan hukum berdasarkan penggolongannya menurut jenis perlindungan hukum ada dua yaitu pertama perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah sebagai upaya untuk melindungi si pencipta (perlindungan preventif). Hal ini ada dalam peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Pemerintah guna untuk meminimalisir dampak dari adanya penjiplakan, peniruan, serta klaim hasil karya orang lain. Perlindungan preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaitannyadengan hasil

---

<sup>64</sup> Fihatul Aidiyah, *Op.Cit.*, h.3-4.

karya fesyen di antaranya yaitu UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.<sup>65</sup>

Kedua yaitu perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Dalam hal perlindungan hak cipta dan desain industri dari sebuah fesyen maka yang dimaksud sebagai perlindungan hukum represif adalah tindakan pasca terjadinya sengketa atau pelanggaran, yaitu upaya hukum setelah terjadinya pelanggaran hak cipta, maka pelaku pelanggaran tersebut akan diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.<sup>66</sup>

Desain ornamental yang diaplikasikan pada pakaian pada umumnya merupakan ciptaan yang termasuk dalam kategori seni rupa, seni batik atau karya-karya fotografi. Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta, yang termasuk lingkup seni rupa yaitu seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.<sup>67</sup> Menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Sementara kolase, adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari manik-manik, batu-batuan, kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Dijelaskan pula bahwa seni terapan yang berupa kerajinan tangan, sejauh

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h.4.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h.4-5.

<sup>67</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 20014 tentang Hak Cipta

tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal, merupakan suatu Ciptaan.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pakaian sebagai sebuah barang fungsional (*useful article*), yang juga diproduksi secara industri (dan dalam jumlah massal), tidak dikategorikan sebagai obyek perlindungan hak cipta menurut Pasal 28 UU Hak Cipta. Karenanya perlu diperhatikan bahwa pada saat pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta, spesimen dari ciptaan yang diajukan dalam permohonan adalah berupa blueprint (model/prototype atau sketsa) dari desain yang termasuk dalam Pasal 40 UU Hak Cipta tersebut di atas. Misalnya, gambar motif bunga, gambar motif batik atau gambar logo-logo dengan bentuk yang indah, tanpa menyebut/menyertakan barang di mana motif tersebut akan diaplikasikan (apakah pakaian, wall paper, kertas kado, dan lain sebagainya).<sup>69</sup>

Untuk desain fesyen dengan perlindungan hak cipta adalah untuk desain yang tidak diproduksi dalam jumlah massal dan untuk kepentingan industri. Biasanya desain tersebut diciptakan oleh desainer-desainer independen, bukan desainer dalam bisnis fesyen retail. Untuk mendapatkan sebuah perlindungan bagi seorang desainer independen tentulah bukan perkara sulit, karena secara finansial desainer independen mampu dari segi finansial mendaftarkan hasil karya desainnya, dimana biaya registrasi yang cukup mahal. Biaya tersebut cukup sebanding dengan output yang dikeluarkan oleh desainer independen.<sup>70</sup>

Berikut unsur-unsur yang harus dipenuhi agar desain tersebut masuk ke perlindungan hak cipta:

---

<sup>68</sup> Fihatul Aidiyah, *Op.Cit.*, h.5.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h.5-6.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h.6.

a. Merupakan sebuah hasil ide kreativitas dalam bentuk seni

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk desain fesyen lebih tepat masuk lapangan seni dimana hasil sebuah desain erat kaitannya dengan seni. Seni batik sebagai salah satu ciptaan dibidang fesyen yang dilindungi oleh UU Hak Cipta serta kebaya yang termasuk ke dalam kategori benda budaya warisan tradisional yang keberadaannya dilindungi. Untuk desain fesyen pada hasil karya desainer belum ada pengaturannya secara khusus di Indonesia, untuk perlindungannya hanya dikaitkan lebih kepada Hak Cipta dan Desain Industri.<sup>71</sup>

b. Tidak diproduksi dalam jumlah massal

Hasil karya sebuah desain fesyen hanya bisa dilindungi oleh Hak Cipta apabila desain tersebut tidak diproduksi secara massal, tetapi hanya satu untuk tiap desainnya. Contohnya desain yang diciptakan oleh seorang desainer yang hanya berwujud satu objek saja tanpa diproduksi massal. Ada sisi *limited* dan *eksklusifitas* dalam rancangan desain tersebut. Biasanya, desain tersebut diciptakan oleh desainer-desainer independen.<sup>72</sup>

Perlindungan desain fesyen dengan desain industri diberlakukan apabila memenuhi unsur-unsur:

a. Sebuah karya seni desain yang baru

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, h.7.



Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 bahwahak desain industri hanya dapat diberikan kepada desain industri yang baru, artinya disini bahwa dianggap baru apabila sebelumnya belum ada pengungkapan desain tersebut. Sedangkan untuk suatu desain industry tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dala rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.<sup>73</sup>

b. Diproduksi massal

Sebuah desain yang didaftarkan dengan desain industri harus desain yang diproduksi secara massal, contohnya pada desain-desain busana yang dikeluarkan oleh ritel-ritel atau konveksi.<sup>74</sup>

## C. HAK CIPTA

### 1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian hak cipta dala UU No. 19 Tahun 2002 (undang-undang ini telah dicabut oleh UU No. 28 Tahun 2014

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

tentang Hak Cipta). Di dalam UU No. 19 Tahun 2002, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun member izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>75</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta, terkesan bahwa hak cipta tersebut hanya hak eksklusif bagi pencipta saja. Ini berbeda UU Hak Cipta Tahun 2002 yang menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak tersebut. Berdasar UU Hak Cipta, hak cipta tidak hanya hak eksklusif bagi pencipta saja, tetapi juga hak eksklusif bagi penerima hak dalam hak cipta tersebut beralih atau dialihkan oleh pencipta kepada pihak lain. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1 Angka 4 UU Hak Cipta menyebutkan ada istilah selain pencipta, yakni pemegang hak cipta. Ketentuan tersebut menentukan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari penerima hak tersebut secara sah.<sup>76</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif. Hak eksklusif tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif merupakan hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian hak eksklusif berupa hak ekonomi. Ciptaan itu sendiri berdasar Pasal 1 Angka 3 adalah karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan

---

<sup>75</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta, FH UII Press, Cet.II, 2014), h.423.

<sup>76</sup> *Ibid.*

atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Di dalam definisi ciptaan di atas tidak ada ketentuan akan adanya keharusan yang menunjukkan adanya “keaslian” ciptaan dimaksud. Ini berbeda keharusan pada dua UU Hak Cipta sebelumnya yang mengharuskan adanya indikasi “keaslian” suatu ciptaan.<sup>77</sup>

Ciptaan di sini adalah ciptaan yang diwujudkan secara nyata. Dengan sudah wujud secara nyata tersebut, suatu cipta dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Termasuk dalam pengertian hal yang dapat dibaca adalah pembacaan huruf braille. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide tidak akan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta karena ide belum memiliki wujud untuk dilihat, didengar atau dibaca.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan (*works*) dalam bidang ilmu (*science*), seni dan sastra (*literary and artistic work*). Adapun yang dimaksud dengan pengumuman menurut Pasal 1 Angka 11 UU Hak Cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, digandakan dalam apapun, secara permanen atau sementara. Kemudian yang dimaksud dengan penggandaan menurut Pasal 1 Angka 12 UU Hak Cipta adalah proses, perbuatan, atau cara

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.<sup>79</sup>

## **2. Saat Lahir Hak Cipta**

Pada dasarnya hak cipta itu ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Hak cipta atas ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra lahir bukan karena pemberian negara. Oleh karena dari segi hukum sulit mengetahui kapan pastinya suatu ciptaan dilahirkan, maka UU Hak Cipta menentukan, bahwa untuk keperluan saat mulainya perlindungan hukum atas hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan. Artinya dibacakan, disuarakan, disiarkan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun, sehingga dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.<sup>80</sup>

## **3. Ciptaan yang Dilindungi**

Pasal 40 UU HC menentukan ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi karya:<sup>81</sup>

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam bentuk format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.
- r. Permainan video
- s. Program computer

#### **4. Pendaftaran Hak Cipta**

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet 1912 dengan UHC Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. Auteurswet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak

cipta. Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importer di Batavia dahulu ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkan.<sup>82</sup>

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure dan de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.<sup>83</sup>

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UHC. Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak

---

<sup>82</sup> H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.89.

<sup>83</sup> *Ibid.*



mutlak. Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan pula pasal 36 UHC Indonesia yang menentukan, “pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan”.<sup>84</sup>

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Ditjen HAKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain “dicaplok” atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Ditjen HAKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggungjawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantive, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.<sup>85</sup>

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Dari

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.<sup>86</sup>

Hal tersebut berarti orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga yang saat ini ditempatkan di bawah Pengadilan Negeri.<sup>87</sup>

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi pasal 5 (1)-nya yang menyatakan bahwa, “kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada, Ditjen HAKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Hal yang paling penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.<sup>88</sup>

Menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran blum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan. Pendaftaran dimaksud diselenggarakan oleh Ditjen HAKI dibawah naungan Departemen Kehakiman dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Mengenai cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan presiden.<sup>89</sup>

Pemohon pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau si pemegang hak kepada Ditjen HAKI denga surat rangkap dua ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai biaya pendaftaran dan contoh ciptaan atau penggantinya, demikian bunyi pasal 37 ayat (2) UHC Indonesia. Karena UHC, Indonesia ini berlaku juga terhadap ciptaan orang bukan Warga Ngara Indonesia dan Badan Asing maka, pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat undang-undang menentukan keharusan yang demikian mungkin ini sebagai penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara implicit dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pendaftaran sehingga tidak ditemukan penafsiran lain sesuai kehendak pemohonnya sehingga orang asing hanya akan dapat perlindungan bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sesuai dengan suasana hukum nasional Indonesia, sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan dalam peraturan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

perundang-undangan Indonesia. Tentu saja ini dimaksudkan demi kepastian hukum dan tidak ada dakwa-dakwi di belakang hari karena kekeliruan penafsiran bahasa, jika pendaftaran itu diperkenankan menurut bahasa negara masing-masing sesuai dengan negara asal penciptanya. Atas dasar surat permohonan tersebut, Ditjen HAKI memuat catatan-catatan dan mencantumkannya dalam daftar umum ciptaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 catatan yang dicantumkan dalam daftar umum ciptaan antara lain; nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkap persyaratan (surat permohonan) dan nomor pendaftaran ciptaan. Pasal ini menyebut “antara lain” itu berarti tidak terbatas pada yang disebutkan dalam undang-undang itu saja, tetapi juga dibuka kemungkinan untuk memuat hal-hal lain yang dianggap perlu yang dicatatkan dalam daftar umum ciptaan tersebut. Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihkan maka, pemilik hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita Resmi Ciptaan. Ketentuan untuk ini diatur dalam pasal 41 dan 43 UHC Indonesia.<sup>90</sup>

Apabila daftar umum ciptaan berubah maka daftar yang diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HAKI harus pula diubah, demikian yang diisyaratkan oleh pasal 43 (2). Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang didaftar dalam satu nomor hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Maksudnya tidak boleh sebagian saja dari ciptaan yang didaftarkan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan. Ciptaan yang dialihkan itu harus totalitas, utuh dan tidak boleh dipecah-pecah. Demikian beberapa uraian penting tentang pendaftaran hak cipta. Selanjutnya Pasal 44 UHC Indonesia ada menyebutkan tentang hapusnya kekuatan hukum pendaftaran hak cipta disebabkan tiga hal. Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran pertama atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua, karena lampau waktu yaitu setelah 50 tahun meninggalnya si pencipta, terhitung sejak tanggal ciptaan itu diumumkan. Ketiga karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikianlah mengenai pendaftaran hak cipta ini menjadi penting artinya, karena melalui pendaftaran lahirlah pengakuan secara *de jure* antara hak dengan bendanya. Namun patut dicatat, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan untuk terbitnya Hak Cipta. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran deklaratif.<sup>91</sup>

## **5. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta**

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HAKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan itu tertera:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
- d. Jenis dan judul ciptaan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
- f. Uraian ciptaan rangkaptiga.

Adakala nama pencipta dan pemeang hak cipta orangnya berbeda. Hal ini dapat terjadi bila ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya kepada penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau kepada produser untuk karya rekaman lagu atau music atau juga karya sinematografi. Pihak lain itu bisa siapa saja tergantung kepada siapa hak cipta itu dialihkan (atau beralih) oleh penciptanya. Dalam keadaan seperti, keduanya harus dicatatkan nama dan kewarganegaraannya dalam surat permohonan. Demikian pula halnya terhadap penerima kuasa. Jenis dan judul ciptaan harus sesuai dengan ketentuan pasal 12 UHC Indonesia, misalnya buku, program computer, ceramah, alat peraga, lagu, music, drama, karya pertunjukan dan lain sebagainya yang tercakup dalam karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>92</sup>

Jenis dan judul ciptaan harus sesuai dengan ketentuan pasal 12 UHC Indonesia, misalnya buku, program computer, ceramah, alat peraga, lagu, music, drama, karya pertunjukan dan lain sebagainya yang tercakup dalam karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali maksudnya adalah, waktu dan tempat ciptaan itu diperkenalkan kepada publik. Sedangkan yang dimaksudkan uraian tentang ciptaan adalah gambaran umum tentang ciptaan yang dituangkan secara tertulis dalam formulir

---

<sup>92</sup> *Ibid.*



permohonan pendaftaran yang telah dipersiapkan secara baku oleh Departemen Kehakiman C.q. Ditjen HAKI.<sup>93</sup>

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam-macam ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon dalam hal penciptanya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai conto j ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya. Nama dan alamat pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya harus ditulis dengan lengkap, namun untuk permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama, pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon. Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, maka dalam surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut. Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang kuasa, maka surat permohonan tersebut selain ditandatangani oleh penerima kuasa, juga harus disertai dengan Surat Kuasa. Kuasa tersebut harus warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia oleh karena itu pada permohonan pendaftaran tersebut harus dilampirkan surat atau bukti lain yang menerangkan tentang kewarganegaraan kuasanya. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, h.95.

untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>94</sup>

Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Direktorat Jendral HAKI atas nama Menteri Kehakiman memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar melengkapi syarat-syarat yang dimaksudkan. Apabila permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka permohonannya menjadi batal demi hukum. Artinya jika pemohon hendak meneruskan permohonannya kembali, ia harus mengulangi kembali syarat-syarat sebagaimana ditetapkan.<sup>95</sup>

Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut oleh Direktorat Jendral HAKI diperiksa apakah pemohon benar-benar Pencipta atau Pemegang Hak atas Ciptaan yang dimohonkan. Sekali lagi pemeriksaannya tidak bersifat substantive, tetapi pemeriksaan secara administrative saja, misalnya ada pernyataan pencipta yang menyatakan karya cipta itu adalah benar-benar hasil ciptaannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Pemohon oleh Direktur Jenderal HAKI.<sup>96</sup>

Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Jenderal HAKI, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga dengan surat gugatan uang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Jenderal HAKI. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya. Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan telah memenuhi syarat-syarat tersebut, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap 2. Kedua lembar surat pendaftaran ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal HAKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, sedangkan lembar kedua surat pendaftaran ciptaan tersebut beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di Kantor Direktorat Jenderal HAKI. Dalam daftar umum ciptaan dimuat keterangan sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
- c. Jenis dan judul ciptaan
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

- e. Uraian ciptaan
- f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima
- g. Tanggal dan jam surat permohonan lengkap
- h. Nomor pendaftaran ciptaan
- i. Kolom-kolom untuk pemindahan hak perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.

Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan Ditjen HAKI yang berisikan keterangan tentang:<sup>98</sup>

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
- c. Jenis dan judul ciptaan
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
- e. Uraian ciptaan
- f. Nomor pendaftaran
- g. Tanggal pendaftarann
- h. Pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan pembatalan
- i. Lain-lain dianggap perlu

Seluruh rangkaian proses pendaftaran hak cipta tersebut dikenakan biaya. Bsarnya biaya trgantung pada jenis permohonan. Permohonan pendaftaran ciptaan, permohonan pemindahan hak, permohonan perubahan nama dan alamat

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

serta permohonan untuk mendapatkan petikan, harus memenuhi biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan Rp7.500,00
- b. Biaya permohonan pencatatan pemindahan  
hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam Daftar Umum Rp7.500,00
- c. Biaya permohonan pencatatan perubahan nama dan  
alamat atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam Daftar  
Umum Rp2.500,00
- d. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan  
dalam Daftar Umum Ciptaan Rp2.500,00

Penerimaan dari hasil pungutan biaya-biaya tersebut di atas dimaksudkan sebagai penerimaan negara yang harus disetorkan seluruhnya ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah beberapa catatan penting tentang prosedur pendaftaran hak cipta.<sup>99</sup>

#### **D. FATWA MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005**

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncull di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normative

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan huku masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.<sup>100</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadist. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyidan tawjih tabyiin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Taujih, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi tabyidan tawjih fatwa syar'iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Melta Afrillya, *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Provinsi Lampung Nomor Kep-004/MUI-LPG/KF/VIII/2010 tentang Hukum Menutup Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.41.

<sup>101</sup> *Ibid.*, h.41-42.



Di Indonesia, lembaga formal non pemerintah yang rutin mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun kedudukannya tidak mengikat seperti hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun fatwa MUI sering menjadi rujukan alternatif bagi umat Islam di Indonesia dalam melakukan sesuatu.

1. Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia:

Adapun pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yaitu:<sup>102</sup>

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

2. Penelaahan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia:

Adapun hal yang ditelaah atau yang menjadi referensi dan bahan ingatan Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa yaitu:

- a. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37, h.462.

Q.S Al-Nisa: 29, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>104</sup>

Q.S. Al-Baqarah: 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”<sup>105</sup>

Q.S. Asy- Syu'ara: 183, yang berbunyi:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>106</sup>

Q.S. Al- Baqarah: 279, yang berbunyi:

..... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>107</sup>

<sup>103</sup> Ibid., h.463.

<sup>104</sup> Q.S al-Nisa: (29): 4.

<sup>105</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 188.

<sup>106</sup> Q.S. Asy- Syu'ara (26): 183.

<sup>107</sup> Q.S. al- Baqarah (2): 279.

- b. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:<sup>108</sup>

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًا فَلِإِنِّنا

Artinya: “Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku.” (H.R. Bukhari)

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...” (H.R. Al- Tirmizi)

خَطَبَنَا رَسُولٌ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا وَلَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ مِنْ مَالِ خِيءٍ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya; “Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad)

- c. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim antara lain:<sup>109</sup>

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...” (H.R. Muslim)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ

<sup>108</sup> Ma'ruf Amin, *Op.Cit.*, hlm.464.

<sup>109</sup> *Ibid.*

Artinya: “*Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya...*” (H.R. Bukhari)

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya, yang berbunyi:<sup>110</sup>

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.*”

- e. Qawa’id fiqh:

- 1) Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.<sup>111</sup>

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentatif hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad):<sup>112</sup>

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudharatan.*”

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fiqh yang bersifat partikular (*furu’*), di antaranya bentuk-bentuk *khiyar* dalam transaksi jual beli, pembatasan wewenang (*al-hijr*), hak *syuf ah* (membeli

<sup>110</sup> *Ibid*, h.465.

<sup>111</sup> *Ibid.*, h.465.

<sup>112</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa’id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.17.

pertama) oleh partner bisnis dan tetangga, *hudud*, *ta'zir*, dan pembatasan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Adapun penjelasan dari sifat partikular tersebut yaitu:<sup>113</sup>

(a) *Khiyar* dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh *syara'* untuk menghilangkan bahaya/mudarat. *Khiyar syarih* dalam transaksi jual beli misalnya diberlakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya bahaya (kerugian) pada orang yang belum berpengalaman dalam transaksi jual beli, sehingga ia rentan menjadi korban penipuan. Sementara *Khiyar ru'yah* mengandung unsur menghilangkan bahaya (kerugian) yang muncul dari kondisi barang yang tidak sesuai dengan sifat-sifat (spesifikasi) yang disebutkan pada saat transaksi dan tidak akan diterima oleh pembeli seandainya ia melihat barang yang dijual tersebut pada saat transaksi. Sedangkan dalam *Khiyar 'aib*, unsure menghilangkan bahaya (kerugian) di dalamnya sudah sangat jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut.<sup>114</sup>

(b) *Al-hijr* (pembatasan wewenang dalam men-*tasharruf*-kan hak milik) mempunyai banyak faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya si pemilik masih kanak-kanak, gila, sembrono (*al-ghafлах*), dan idiot (*as-safah*). Mekanisme *al-hijr* yang diterapkan pada mereka sesungguhnya diberlakukan untuk memelihara

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

kemaslahatan mereka sendiri dan menghindari bahaya pengeksploitasian mereka.<sup>115</sup>

(c) *Syuf'ah* (hak membeli pertama), ditetapkan milik partner kongsi (asy-syarik) untuk menepis bahaya pembagian barang kongsi, sedangkan hak *syuf'ah* bagi seorang tetangga dimaksudkan untuk menepis bahaya perlakuan buruk bertetangga (*su' al-jiwar*) yang mungkin ia terima dari tetangga baru yang dapat jadi berkelakuan buruk.<sup>116</sup>

(d) *Qishash* dalam konteks jiwa dan *hudud* di syariatkan untuk menepis bahaya yang menyeluruh dari masyarakat dan memelihara kelima prinsip umum atau *dharuriyyat*, yaitu jiwa, agama, akal, keturunan, (*nasab*), dan harta. Sedangkan *qishash* dalam konteks selain jiwa ditetapkan untuk menyingkirkan unsure bahaya dari pihak korban tindak kejahatan dengan mengobati rasa dendamnya terhadap orang yang melanggar haknya sesuai dengan watak alamiah manusia. Dari sisi lain, pelaku kejahatan pun terlindungi dengan mekanisme *qishash* ini dari tindak balas dendam yang lebih hebat dari pihak korban. Pensyariatan *qishash* juga menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat.<sup>117</sup>

(e) Demi menjaga kemaslahatan umum, maka disyariatkanlah berbagai bentuk hukuman *ta'zir* guna mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual baik sebagai tindakan preventif ataupun represif

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*, h.18.

<sup>117</sup> *Ibid.*



dengan cara yang mungkin dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh yang ditimbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal.

- (f) Pembatasan (limitasi) kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun *tasharruf*-nya pada hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain yang termasuk kategori upaya pencegahan bahaya yang mengerikan dengan segala cara jika memang ia benar-benar terjadi. Misalnya, jika seseorang menyewa sebuah kios untuk dipergunakan sebagai tempat pandai besi, tempat pemanggangan roti, atau alat distiller minyak, maupun dapur, sementara kios tersebut terletak di blok pedagang kain sutera, maka hal tersebut dilarang, sebab bahaya (kerugian) yang dapat ditimbulkan jelas lebih besar daripada bahaya (kerugian) yang mungkin ditanggung oleh orang tersebut seorang diri, karena kemaslahatan sosial didahulukan daripada kemaslahatan individual.<sup>118</sup>

Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam tersebut, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Akan tetapi, jika langkah

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

penepisanbahaya tersebut sudah tidak memungkinkan lagi, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya merupakan keniscayaan, misalnya penutupan akses matahari dan udara secara total bagi pihak tetangga, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.<sup>119</sup>

2) Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.<sup>120</sup>

3) Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.<sup>121</sup>

4) Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.<sup>122</sup>

### 3. Hal yang menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia

a. peH/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah.<sup>123</sup>

1) Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

2) Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Ma'ruf Amin, *Op. Cit.*, h.465.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*, h.466.

dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

- 3) Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

b. Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain:

- 1) Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).<sup>124</sup>
- 2) Berkenaan dengan hak kepengarangan. Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara'/hukum Islam atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.<sup>125</sup>
- 3) Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, h.467.

<sup>125</sup> *Ibid.*

- 4) Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:<sup>126</sup>
- a. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman
  - b. Undang- Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  - c. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - d. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - e. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
  - f. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk
  - g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 5) Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005

4. Ketetapan Fatwa Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pertama: **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, h.468.

memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sehingga bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang sah dimana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.<sup>127</sup> Hak Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya, untuk member persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.<sup>128</sup>
- b. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikannya lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasi Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm.469.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm.469.

<sup>129</sup> *Ibid.*, h.470.

- c. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>130</sup>
- d. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>131</sup>
- e. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>132</sup>
- f. Hak atas Merk, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.<sup>133</sup>
- g. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*



untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>134</sup>

Kedua: **Ketentuan Hukum**

- a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).<sup>135</sup>
- b. HKI yng mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>136</sup>
- c. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.<sup>137</sup>
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.<sup>138</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*, h.470-471.

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

Ketetapan fatwa MUI ini di sahkan di Jakarta pada 28 Juli 2005 M dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia oleh K.H. Ma'ruf Amin sebagai pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa.<sup>139</sup>



---

<sup>139</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **EKONOMI KREATIF, PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA, dan CONTOH KASUS PELANGGARAN**

### **A. EKONOMI KREATIF**

#### **1. Pengertian Ekonomi Kreatif**

Istilah Ekonomi Kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2007), ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga (ekonomi informasi) dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan.<sup>1</sup> Pergeseran dari Era Pertanian lalu Era Industrialisasi, disusul oleh Era Informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi infokom serta globalisasi ekonomi, telah menggiring peradaban manusia kedalam suatu arena interaksi sosial baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.<sup>2</sup> Pergeseran gelombang ini telah membawa peradaban yang baru dan semakin berkembang bagi manusia.<sup>3</sup>

Indonesia menciptakan suatu pola kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan lebih efisien. Adanya perkembangan seperti penemuan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya internet, email,

---

<sup>1</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia* (www.nulisbuku.com, 2016), h.6.

<sup>2</sup> Departemen Perdagangan RI, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008), h.1.

<sup>3</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Op.Cit.*, h.6.

*google playstore*, dan sebagainya semakin mendorong manusia menjadi lebih aktif dan produktif dalam menemukan teknologi-teknologi baru.<sup>4</sup>

Dampak yang muncul akibat dari fenomena perubahan gelombang ini adalah munculnya daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar. Kondisi ini menuntut perusahaan mencari cara agar bisa menekan biaya semurah mungkin dan se-efisien mungkin guna mempertahankan eksistensinya.<sup>5</sup> Negara-negara maju mulai menyadari bahwa saat ini mereka tidak bisa hanya mengandalkan bidang industri sebagai sumber ekonomi di negaranya tetapi mereka harus lebih mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif karena kreativitas manusia itu berasal dari daya pikirnya yang menjadi modal dasar untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar.<sup>6</sup> Sehingga, pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas dan populer dengan sebutan Ekonomi Kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut Industri Kreatif.<sup>7</sup>

Ekonomi Kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.7.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.<sup>8</sup>

Ekonomi kreatif adalah suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.<sup>9</sup> Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan.<sup>10</sup>

a. Kreativitas (*Creativity*)

Pengertian kreativitas dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, *fresh*, dan dapat diterima umum. Bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (*thinking out of the box*). Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuan itu, bisa menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri beserta orang lain.<sup>11</sup>

b. Inovasi (*Innovation*)

Inovasi adalah suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.8.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.9.

menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Sebagai contoh inovasi, cobalah melihat beberapa inovasi di video-video *youtube.com* dengan kata kunci “*lifhack*”. Di dalam video tersebut diperlihatkan bagaimana suatu produk yang sudah ada, kemudian di-inovasikan dan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai jual lebih tinggi dan lebih bermanfaat.<sup>12</sup>

c. Penemuan (*Invention*)

Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis android dan iOS juga menjadi salah satu contoh penemuan yang berbasis teknologi dan informasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.<sup>13</sup> Lebih tepatnya seperti aplikasi *whatsapp* atau aplikasi *photoshop* untuk mempermudah mengedit foto saat melakukan penjualan produk.

Istilah Ekonomi Kreatif mulai ramai diperbincangkan sejak John Howkins, menulis buku “*Creative Economy, How People Make Money from Ideas*”. Howkins mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah gagasan. Dalam satu kalimat yang singkat, esensi dari kreativitas adalah gagasan. Maka dapat dibayangkan bahwa hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.10.



tinggi.<sup>14</sup> Kondisi ekonomi yang diharapkan oleh Indonesia adalah ekonomi yang berkelanjutan dan juga memiliki beberapa sektor sebagai pilar maupun penopang kegiatan ekonomi di Indonesia. Keberlanjutan yang dimaksud adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap kondisi geografis dan tantangan ekonomi baru, yang pada akhirnya menghasilkan keberlanjutan pertumbuhan (*sustainable growth*).<sup>15</sup>

Pertumbuhan yang tinggi tercermin dari kompetensi individu-individu dalam menciptakan inovasi. Ekonomi Kreatif yang di dalamnya terdapat industri-industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi di dalam ekonomi berkelanjutan karena individu-individunya memiliki modal kreativitas (*creative capital*) yang mereka gunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk pengembangan perekonomian di Indonesia, yang mana Indonesia bisa mengembangkan model ide dan talenta dari rakyat untuk dapat menginovasi dan menciptakan suatu hal.<sup>16</sup>

Negara-negara membangun kompetensi ekonomi kreatif dengan caranya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada pada negara tersebut. Ada beberapa arah dari pengembangan industri kreatif ini, seperti pengembangan yang lebih menitik beratkan pada industri berbasis: (1) Lapangan usaha kreatif dan budaya (*creative cultural industry*); (2) Lapangan usaha kreatif (*creative industry*); (3) Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright industry*).<sup>17</sup> Sehingga, dari ketiga alternatif hal tersebut dapat terkotakkan bahwa pengembangan hak kekayaan intelektual juga berpengaruh dalam pengembangan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.11.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Departemen Perdagangan RI, *Op.Cit.*, h.1.

ekonomi kreatif, baik penitik beratan pada sisi terakhir, kedua, atau bahkan penitik beratan yang pertama.

## 2. Sejarah Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia

Pada Tahun 2005, mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tentang pentingnya mengembangkan industri pada sektor yang bersumber pada kerajinan dan kreativitas bangsa. Setelah itu, pada tahun 2006, menteri perdagangan RI saat itu, Dr. Mari Elka Pangestu meluncurkan program *Indonesia Design Power* di jajaran Departemen Perdagangan RI, suatu program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dipasar domestik maupun luar negeri. Program *Indonesia Design Power* menitik beratkan pada pengembangan sektor jasa, dan dapat memberikan ruang bagi pelaku dan industri kreatif. Setelah itu, istilah Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif mulai sering diperbincangkan masyarakat Indonesia.<sup>18</sup>

Tepat satu tahun setelah program *Indonesian Design Power* berjalan, terdapat agenda Pekan Produk Budaya Indonesia dengan tema “Bunga Rampai Produk Budaya Indonesia untuk Dunia”. Program *Indonesia Design Power* ini terus berjalan dan juga pada tahun 2008 diluncurkan buku studi pemetaan industri kreatif Indonesia. Buku tersebut merupakan buku pertama di Indonesia yang membahas tentang potensi dan pemetaan sektor industri kreatif di Indonesia.<sup>19</sup>

Setelah itu, disahkannya Inpres No. 6/2009 pada tahun 2009 serta dicanangkan sebagai Tahun Indonesia Kreatif oleh Presiden SBY. Pada tahun yang sama, Pameran Virus Kreatif yang mencakup sektor industri kreatif dan

---

<sup>18</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Op.Cit.*, h.12.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Pameran Nusa yang mengenalkan industri pangan Indonesia diselenggarakan dan berjalan sukses. Hal ini menjadi bukti bahwa perkembangan Industri Kreatif di Indonesia mengarah pada tren yang positif.<sup>20</sup>

Pada tahun 2010, dibuat suatu platform digital yang bernama Ekonomi Kreatif Indonesia ([indonesiakreatif.net](http://indonesiakreatif.net)) yang berfungsi untuk wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui perkembangan Industri kreatif Indonesia. Disisi lain, mulai adanya sosialisasi yang semakin intens dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam perihal pembuatan data eksportir, importer, para pengusaha, kalangan asosiasi dan para pelaku industri kreatif serta lembaga pendidikan formal maupun non-formal.<sup>21</sup> Perkembangan lainnya ialah pembuatan cetak biru “Rencana Pengembangan Industri Kreatif Nasional 2025”. Dimuat pula rencana pengembangan 14 sub-sektor industri kreatif tahun 2009-2015 (Inpres No. 6 Tahun 2009) yang mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015.<sup>22</sup>

Prioritas pada periode tahun 2009-2014 mencakup 7 kelompok industri kreatif, yaitu Arsitektur, Fesyen, Kerajinan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak, Periklanan, Permainan Interaktif serta Riset dan Pengembangan. Tekad pemerintah dipertegas dalam pidato Presiden RI dipembukaan Pameran Pekan Budaya Indonesia di Jakarta, yang tengah bersiap-siap menyambut era Ekonomi Kreatif ini, dimana kepala negara menyebutnya sebagai ekonomi gelombang ke-4.<sup>23</sup> Saat ini, sub sektor ekonomi kreatif sudah bertambah satu sektor, yaitu sektor

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.13.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.14.

kuliner. Total sampai saat ini ada 15 sub-sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Pemetaan Industri kreatif di Indonesia ditetapkan berdasarkan studi akademik atas Klasifikasi Baku Usaha Industri Indonesia (KBLI) yang diolah dari data Badan Pusat Statistik dan sumber data lainnya seperti komunitas kreatif, lembaga pendidikan dan pelatihan yang dirilis di media elektronik maupun media cetak.<sup>24</sup>

### 3. Subsektor Ekonomi Kreatif Di Indonesia

Dengan adanya konsep ekonomi kreatif, sisi industrialisasi-pun bisa dikembangkan kearah industri kreatif. Industri kreatif merupakan industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Ekonomi Kreatif sering dilihat sebagai sebuah konsep yang memayungi juga konsep lain yang populer di awal abad ke-21 ini, yaitu Industri Kreatif.<sup>25</sup>

Industri kreatif sendiri sebenarnya merupakan sebuah konsep yang telah muncul lebih dahulu sebelum munculnya konsep ekonomi kreatif. Tercatat istilah “industri kreatif” sudah muncul pada tahun 1994 dalam laporan “*Creative Nation*” yang dikeluarkan Australia. Namun istilah ini benar-benar mulai terangkat pada tahun 1997 ketika *Department of Culture, Media, and SPORT (DCMS) United Kingdom* mendirikan *Creative Industries Task Force*.<sup>26</sup>

Definisi industry kreatif menurut *Creative Industries Task Force*, adalah “*Creative Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential for weath and job creation*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.15

<sup>26</sup> *Ibid.*

*through the generation and exploitation of intellectual property and content*".<sup>27</sup>

Definisi *Creative Industries Task Force* inilah yang menjadi acuan definisi industri kreatif di Indonesia sebagai berikut: "Industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut."<sup>28</sup> Sampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengidentifikasi lingkup industry kreatif mencakup 15 sub-sektor, antara lain:

a. Periklanan (*advertising*)

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan media dan sasaran tertentu. Meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan, misalnya dimulai dari riset pasar, setelah itu dibuat perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material periklanan, promosi dan relasi kepada publik. Selain itu, tampilan periklanan dapat berupa iklan media cetak (surat kabar dan majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan media reklame, serta penyewaan kolom untuk iklan pada situs-situs website, baik website kelas mikro maupun website kelas makro.<sup>29</sup>

b. Arsitektur

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Departemen Perdagangan RI, *Op.Cit.*, h.4.

<sup>29</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Op.Cit.*, h.17.

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (*Town planning, urban design, landscap architecture*) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, desain interior).<sup>30</sup>

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro (*town planning, urban design, landscape architecture*) sampai level mikro (detail konstruksi)). Misalnya arsitektur taman kota, perencanaan biaya konstruksi, pelestarian bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrikal.<sup>31</sup>

#### c. Pasar Barang Seni

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, *automobile*, film, seni rupa dan lukisan.<sup>32</sup> Seperti halnya barang-barang berbau *vintage* maupun barang-barang peninggalan orang-orang terkenal.<sup>33</sup>

#### d. Kerajinan (*Craft*)

---

<sup>30</sup> Departemen Perdagangan RI, *Op.Cit.*, h.5.

<sup>31</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Op.Cit.*, h.17.

<sup>32</sup> Departemen Perdagangan RI, *Op.Cit.*, h.5.

<sup>33</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Op.Cit.*, h.17.



Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relative kecil (bukan produksi *massal*).<sup>34</sup>

e. Desain

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.<sup>35</sup> Seperti pembuatan desain apartemen, atau desain rumah susun.<sup>36</sup>

f. Fesyen (*Fashion*)

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.<sup>37</sup>

g. Video, Film dan Fotografi

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk didalamnya

---

<sup>34</sup> Departemen Perdagangan RI, *Loc.Cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Op.Cit.*, h.18.

<sup>37</sup> Departemen Perdagangan RI. *Op.Cit.*, h.5.

penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan pameran atau festival film.<sup>38</sup>

h. Permainan Interaktif (*Game*)

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer ataupun android serta iOS maupun video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sub-sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.<sup>39</sup>

i. Musik

Kegiatan kreatif yang berupa kegiatan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.<sup>40</sup>

j. Seni Pertunjukan (*Showbiz*)

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan. Misalnya, pertunjukan wayang, balet, tari tradisional, tari kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.<sup>41</sup>

k. Penerbitan dan Percetakan

Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan

---

<sup>38</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Op.Cit.*, h.19.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.19.

perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi, saham dan surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (*engraving*) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.<sup>42</sup>

- l. Layanan Komputer dan Piranti Lunak (*software*) atau Teknologi Informasi  
Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.<sup>43</sup>

- m. Televisi & Radio (*Broadcasting*)

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar) siaran radio dan televisi.<sup>44</sup>

- n. Riset dan Pengembangan (*Research and Development*)

Kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.20.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.20-21.

berkaitan dengan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni sastra jasa konsultasi bisnis dan manajemen.<sup>45</sup>

o. Kuliner

Kegiatan kreatif dengan usaha inovatif yang menawarkan produk-produk kuliner yang menarik, mulai dari penyajian, cara pembuatan, sampai dengan komposisi makanan atau minuman yang disajikan. Seperti anak dari Presiden Indonesia, Joko Widodo yaitu Gibran yang membuat bisnis catering dengan mengkombinasikan sektor inovasi dan kreasi kedalam makanan dan minuman.<sup>46</sup>

## **B. Subsektor Ekonomi Kreatif Fesyen**

Subsektor Ekonomi Kreatif Fesyen merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.<sup>47</sup> Fesyen atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *fashion* merupakan salah satu bidang dalam industri kreatif yang keberadaannya sedang berkembang di Indonesia. Dalam industri kreatif sangat syarat dengan kreativits dan inovasi. Banyak desainer yang menciptakan desain-desain *fashion* yang menarik serta diminati banyak kalangan. Desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda, misalnya busana. Desain dari sebuah

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Departemen Perdagangan RI, *Op.Cit.*, h.5.

*fashion* merupakan hasil ide dan kreatifitas dari seorang desainer yang patut dilindungi dan dihargai.<sup>48</sup>

### 1. Pengertian Fesyen dan Desain

Aspek fesyen atau *fashion* semakin menyentuh kehidupan sehari-hari setiap orang. *Fashion* mempengaruhi apa yang kita kenakan, kita makan, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memandang diri sendiri. *Fashion* juga memicu pasar dunia untuk terus berkembang, produsen untuk memproduksi, pemasar untuk menjual dan konsumen untuk membeli. Cara berpakaian yang mengikuti *fashion* juga memperlihatkan kepribadian dan idealisme kita.<sup>49</sup>

*Fashion* sekarang ini adalah bisnis yang cukup besar dan menguntungkan. Seperti dikatakan oleh Jacky Mussry, Partner/ Kepala Divisi Consulting & Research MarkPlus&Co, bahwa gejala ramai-ramainya berbagai produk mengarah ke *fashion* muncul tatkala konsumen makin ingin diakui jati diri sebagai suatu pribadi. Karena itu, mereka sengaja membentuk identitasnya sendiri dan kemudian bersatu dengan kelompok yang selaras dengannya. Inilah kebanggaan seseorang jika bisa masuk ke dalam apa yang sedang menjadi kecenderungan umum, karena berarti ia termasuk *fashionable* alias modern karena selalu mengikuti mode.<sup>50</sup>

Pengertian *fashion* itu sendiri memiliki banyak sisi. Menurut Troxell dan Stone dalam bukunya *Fashion Merchandising*, *fashion* didefinisikan sebagai gaya

---

<sup>48</sup> Fihatul Aidiyah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2013), h. Abstrak.

<sup>49</sup> Dian Savitrie, *Pola Perilaku Pembelian Produk Fashion pada Konsumen Wanita (Sebuah Studi Kualitatif pada Mahasiswi FE UI dan Pengunjung Butik N.y.l.a)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h.13.

<sup>50</sup> *Ibid.*

yang diterima dan digunakan oleh mayoritas anggota sebuah kelompok dalam satu waktu tertentu. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa *fashion* erat kaitannya dengan gaya yang digemari, kepribadian seseorang dan rentang waktu. Sehingga, dapat dimengerti mengapa sebuah gaya yang digemari bulan ini bisa dikatakan ketinggalan jaman beberapa bulan kemudian.<sup>51</sup> Dalam literatur lainnya yaitu menurut Solomon dalam karyanya '*Costumer Behaviour: European Perspective*', *fashion* adalah proses penyebaran sosial (*social-diffusion*) dimana sebuah gaya baru diadopsi oleh kelompok konsumen. *Fashion* atau gaya mengacu pada kombinasi beberapa atribut. Dan agar dapat dikatakan '*in fashion*', kombinasi tersebut haruslah dievaluasi secara positif oleh sebuah *reference group*.<sup>52</sup>

Istilah gaya dan desain perlu dijelaskan agar tidak disamakan dengan *fashion*. Gaya (*style*) adalah sebuah karakteristik dalam mempresentasikan sesuatu. Dalam lingkup pakaian, gaya adalah karakteristik penampilan bahan pakaian, kombinasi fitur-fiturnya yang membuatnya berbeda dengan pakaian lain. Contohnya, rok sebagai salah satu gaya berpakaian bagi wanita, pilihan lainnya adalah celana. Jas pria adalah salah satu gaya berpakaian pria, pilihan lainnya adalah jaket olahraga. Gaya suatu saat bisa diterima dan suatu saat bisa pergi, namun gaya yang spesifik akan tetap diingat, entah itu dikatakan *fashion* atau tidak.<sup>53</sup>

Sedangkan desain adalah versi spesifik gaya. Contohnya rok yang menjadi gaya berpakaian wanita, namun memiliki desain yang berbeda-beda seperti A-line, *highwaist* (pinggang tinggi), rok mini, dan lain-lain. Biasanya produsen

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, h.14.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h.15.



pakaian membuat beberapa variasi desain dari gaya yang sedang digemari saat itu agar konsumen punya banyak pilihan. Baik gaya dan desain secara bersama-sama berperan dalam menentukan *fashion* pada waktu itu. Para desainer membuat berbagai macam gaya tiap musim berdasarkan dari apa yang menurut mereka akan disukai konsumen. Dari bermacam gaya itu, produsen memilih mana yang kiranya akan sukses di pasar, dan biasanya mereka menolak lebih banyak daripada yang mereka pilih. Penjual (ritel) memilih mana yang pelanggan mereka mau dari apa yang ditawarkan produsen. Lalu pada akhirnya konsumen yang memegang peranan kunci, mereka memilih satu gaya dan menolak gaya yang lain, dan hanya mereka yang pada akhirnya menentukan gaya mana yang akan menjadi *fashion*.<sup>54</sup>

*Fashion* dapat dikategorikan berdasarkan di kelompok mana mereka terlihat. *Hight fashion* mengacu pada desain dan gaya yang diterima oleh kelompok *fashion leaders* yang eksklusif, yaitu konsumen-konsumen yang elit dan mereka yang paling pertama mengadaptasi perubahan *fashion*. Gaya yang termasuk *high fashion* biasanya diperkenalkan, dibuat, dan dijual dalam jumlah yang terbatas dan relative mahal kepada *socialites*, artis, selebritis dan *fashion innovators*. Sedangkan *mass fashion* atau *volume fashion* mengacu pada gaya dan desain yang diterima publik lebih luas. Jenis *fashion* ini biasanya diproduksi dan dijual dalam jumlah banyak dengan harga murah sampai sedang.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, h.15-16.

## 2. Pengertian Busana Muslimah dan Busana Non Muslimah

Busana muslimah adalah bahasa populer di Indonesia untuk menyebabkan pakaian wanita muslim.<sup>56</sup> Sedangkan, busana non muslimah adalah busana yang melambangkan pakaian wanita yang tidak sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an, busana muslimah banyak sebutannya antara lain menurut M. Quraish Shihab yaitu:<sup>57</sup>

- a. Libas adalah segala sesuatu yang di pakai baik penutup badan, kepala atau yang di pakai di jari dan lengan seperti cincin dan gelang.
- b. Kata Risy pada mulanya berarti bulu dan karena bulu binatang merupakan hiasan atau hingga kini di pakai oleh sementara orang sebagai hiasan baik di kepala maupun melilit di leher, maka kata tersebut di pahami dalam pakaian yang berfungsi sebagai hiasan.

Kedua pengertian diatas, dapat di tarik pengertian busana muslimah adalah pakaian wanita-wanita Islam yang lengkap dan dapat menutupi aurat sesuai dengan ajaran Islam, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimana ia berada.<sup>58</sup> Dalam Islam banyak temuan istilah-istilah busana muslimah antara lain sebagaimana dijelaskan oleh Mulhandy Ibn. Haj yaitu jilbab, kerudung, hijab, purdah, dan cadar:<sup>59</sup>

- a. Jilbab. Jilbab berasal dari bahasa Arab yang jamaknya “Jalaabiib” artinya pakaian yang lapang atau luas. Pengertiannya adalah pakaian yang lapang

---

<sup>56</sup> Listiani, *Motivasi Siswi Dalam Mengenakan Busana Muslimah di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat* (Bandar Lampung: FTK UIN Raden Intan Lampung, 2017) h.28.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, h.29.

<sup>59</sup> *Ibid.*

dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang di tampilkan.

- b. Kerudung. Kerudung adalah bahasa Indonesia yang bahasa Arabnya “Khimar” jamaknya “Khumur” artinya tutup atau tudung yang menutup kepala, leher, sampai dada wanita.
- c. Hijab. Hijab berasal dari bahasa Arab artinya sama dengan tabir atau dinding/penutup.
- d. Purdah. Purdah dalam bahasa Arab artinya “Burdah” yang berarti pakaian luar atau tirai yang berjahit.
- e. Cadar. Cadar dalam bahasa Arab artinya “Khidr” atau “Tsikob” yang berarti penutup muka atau sebagian wajah wanita, hanya mata saja yang Nampak.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa busana muslimah adalah pakaian yang di peruntukkan untuk muslim wanita atau wanita muslimah, yang berfungsi sebagai pembeda antara wanita muslim atau wanita non muslim. Dalam pembahasan busana muslimah identik dengan cara menutup aurat. Adapun pengertian aurat itu sendiri yaitu sesuatu yang harus di tutupi, dijaga, bagian anggota tubuh yang harus ditutupi dalam shalat. Aurat juga merupakan sesuatu yang buruk, atau bagian yang tidak patut kelihatan dihadapan orang lain dan berbeda-beda menurut status dan kelamin mereka.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h.30.

Berkenaan dengan masalah aurat ini, Islam telah menetapkan batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Dan aurat wanita ada 2 pendapat, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Seluruh anggota badan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ini di pegang oleh al-hadi dan al-qasim dalam salah satu pendapatnya dan Asy-Syafi'i serta al-Malik.
- b. Seluruh badan wanita adalah aurat, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki, pendapat ini di pegang oleh Abu Hanifah.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut mengenai aurat wanita dalam berbusana, penulis lebih cenderung pada pendapat yang pertama, dan lebih familiar dengan pendapat pertama, namun bukan berarti penulis menyalahkan pendapat kedua. Perintah wanita menutup aurat disebabkan karena laki-laki hanya diperbolehkan memandang wanita dalam batas-batas keluarga yang sehat, harmonis, dan saling mempercayai sebagai seni terwujudnya masyarakat yang sehat, damai, dan berwibawa serta menjunjung tinggi harkat wanita. Hal ini sbagaimana yang di kemukakan oleh Fuad M. Fachrudin yang mengatakan, bahwa busana yang dikenakan seorang muslimah bukan hanya menutup badan saja, melainkan dapat menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat.<sup>62</sup>

Dasar hukum wanita dalam berbusana:

- a. Q.S. Al-Araaf ayat 26, yang berbunyi

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, h.32.

يٰٓبَنِي ٓءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكُمْ لِبَاسًا يُورِى سَوَءَ تِكْمٍ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ  
 مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ ﴿٦٣﴾

Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”<sup>63</sup>

b. Q.S. An-Nur ayat 31, yang berbunyi:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصٰرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ  
 مِنْهَا ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى اُجُوْبِهِنَّ ۚ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,...”<sup>64</sup>

c. Q. S. Al-Ahzab ayat 59, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذٰلِكَ اَدْنٰى  
 اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>65</sup>

Bila diteliti lebih jauh, kewajiban menutup aurat ini ada hubungannya dengan kewajiban lain yang diperintahkan Allah demi kemaslahatan manusia seperti.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Q.S. al-Araaf (7): 26.

<sup>64</sup> Q.S. an-Nur (24): 31.

<sup>65</sup> Q.S. al-Ahzab (33): 59.

<sup>66</sup> Listiani, *Op.Cit.*, h.33-34.

1. Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan.
2. Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari menghindari terjadinya perzinahan.
3. Menutup aurat menjadi wajib karena sad adz-dzara'i, yaitu menutup pintu dosa yang lebih besar.

Sehingga, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat adalah wajib bagi setiap pribadi wanita dan pria Islam. Khususnya kaum wanita, kewajiban ini di wujudkan dengan mengenakan busana muslimah atau yang sering dikenal dengan jilbab.<sup>67</sup> Menurut pendapat Abdul Halim Abu Syaqqah dalam bukunya “kebebasan wanita” menyebutkan syarat pakaian wanita dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya yaitu:<sup>68</sup>

- a. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah, tangan, dan kaki
- b. Sederhana dalam menghias pakaian, wajah, tangan dan kaki
- c. Pakaian dan perhiasan itu harus yang dikenal masyarakat islam
- d. Harus berbeda dengan pakaian laki-laki
- e. Harus berbeda dengan pakaian wanita kafir

Kriteria busana muslim menurut Hannan Athiyah Ath-thuri, yaitu:<sup>69</sup>

- a. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dengan kedua telapak tangan
- b. Tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh
- c. Tidak tipis dan tembus pandang sehingga menampakkan kulit tubuh
- d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h.35.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h.36.

<sup>69</sup> *Ibid.*



- e. Tidak mencolok dan berwarna yang dapat menarik perhatian
- f. Tidak menyerupai pakaian kafir

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Hashruddin Al-Albani syarat jilbab yang baik dikenakan berdasarkan syari'at adalah:<sup>70</sup>

- a. Meliputi seluruh badan , selain yang dikecualikan
- b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan
- c. Tebal, tidak tipis
- d. Longgar, tidak ketat
- e. Jangan diberi parfum atau minyak wangi
- f. Jangan menyerupai pakaian laki-laki
- g. Jangan menyerupai pakaian wanita kafir
- h. Bukan pakaian untuk mencari popularitas

## **C. PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA**

### **1. Perlindungan Hak Cipta sebagai Hak Milik**

Setelah pada bagian sebelumnya kita melihat bahwa hak cipta itu merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan, maka pada bagian ini akan diuraikan bagaimana undang-undang memberikan perlindungan terhadap si pemilik atau si pemegang hak. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus-menerus di tangan siapapun benda itu berada. Jika kita cermati perlindungan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

hak cipta sebagai hak kebendaan yang immaterial maka kita akan tringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immaterial. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibab atau wasiat atau dengan cara lain, (UHC Indonesia).<sup>71</sup>

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undag terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.<sup>72</sup>

UHC Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat

---

<sup>71</sup> H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.111.

<sup>72</sup> *Ibid.*

yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara tepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Dengan argumentasi bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta, menurut hemat penulis penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa dinilai cukup tepat. Jika selama ini pemerintah menarik pajak dari barang bajakan (dan ini memang mungkin saja dapat dilakukan) lebih jauh masyarakat konsumen tidak terlalu dirugikan dengan adanya pembajakan tersebut, apalagi tidak dapat dipastikan bahwa kualitas barang bajakan selalu lebih buruk daripada barang yang diproduksi secara legal, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa membuat para produsen sudah harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, negara sebagai pemungut pajak harus memberikan perlindungan terhadap pemilik yang legal.<sup>73</sup>

Pembuktian anggapan ini dibenarkan oleh terjadinya pembajakan buku *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka (ulama besar Indonesia), dibajak dengan kualitas kertas maupun penjilidannya lebih baik dari yang diproduksi penerbit dengan izin si pencipta dan harganya dijual jauh lebih murah. Hal ini tentu secara ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Hanya saja keadaan ini tidak dibenarkan hukum, sebab ada pihak lain yang dirugikan yakni pencipta dan penerbit. Pembajakan tetap merupakan tindakan kurang baik, tindakan tidak terpuji, bertentangan dengan prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan unsur

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, h.112.

kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan jerih paya orang lain.<sup>74</sup>

Dalam peristiwa ini, pada dasarnya yang dirugikan adalah pencipta atau si pemegang hak, sedangkan masyarakat konsumen merasa lebih beruntung. Ia dapat membeli dengan harga yang murah. Seyogyanya lewat delik biasa, pemegang hak cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari pemegang hak, pihak kepolisian atau penyidik lainnya dapat menindak pembajak. Sama seperti kejahatan lainnya, peristiwa pembajakan juga merupakan masalah yang sulit dihapus atau terhapus begitu saja. Hal ini memang masih memerlukan pengkajian yang lebih jauh, sebab ini tidak hanya menyangkut mentalitas aparat penegak hukum Indonesia tetapi mungkin merupakan masalah mentalitas manusia Indonesia secara keseluruhan. Belum lagi ancaman terbesar lainnya terhadap pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi computer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Napster merupakan nama program komputer yang mampu “mencuri” karya cipta orang lain. Penemu program komputer ini adalah Shaw Fanning yang waktu ia menemukan program itu baru berusia 19 tahun, demikian menurut penuturan Putut Widjanarko, seorang praktisi dan pengamat penerbitan di Bandung dalam tulisannya di kolom selistik, *Harian Republika*.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h.113.

<sup>75</sup> *Ibid.*

Tantangan ke depan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang hukum perlindungan hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program computer dan fasilitas *e-book* (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat/konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penguasaan materi hukum semata-mata. Perubahan-perubahan pada teknologi music, perbukuan, perfilman dan teknologi penyebaran informasi melalui *cybernet*, akan menyebabkan berubah pada pola bisnis. Akibatnya bentuk kejahatan atau tindak pidana juga berubah.<sup>76</sup>

Ancaman pidana 7 tahun atau denda lima milyar rupiah versi Pasal 72 UHC Indonesia, dan ditambah dengan ancaman pidana minimal 1 bulan dan atau denda satu juta rupiah menurut hemat penulis sudah cukup memadai untuk tujuan preventif. Hanya saja yang menuntut untuk segera dilaksanakan adalah aspek penegakan hukumnya. Apalagi sanksi pidana itu tidak menghapuskan tuntutan secara keperdataan yang besarnya tergantung pada kerugian yang diderita oleh pencipta atau pemegang hak, tentu saja ini diharapkan dapat mencegah tindak pidana pembajakan hak cipta.<sup>77</sup>

## **2. Tugas Penyidik**

Terhadap tindak pidana hak cipta, penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat penyidik yakni:<sup>78</sup>

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berada di lingkungan departemen yang lingkup tugasnya atau memiliki tanggung jawab dalam bidang pembinaan hak cipta.

Penyidik yang berasal dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia melakukan tugas dan wewenang penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No.8 Tahun 191 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang itu meliputi:<sup>79</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*



Tugas penyidikan yang dimaksudkan oleh ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tersebut, tentu bersifat umum, artinya untuk seluruh jenis tindak pidana. Tidak terkecuali tindak pidana yang dipersangkakan itu diatur dalam KUH Pidana ataupun di luar KUH Pidana, misalnya adalah tindak pidana terhadap Hak Cipta. Saat ini aparat penyidik kepolisian banyak yang tidak memahami tentang seluk beluk kejahatan atau pelanggaran hukum hak cipta. Materi hukum tentang apa yang termasuk dalam kejahatan hak cipta itu tidak semuanya dapat dipahami dengan baik oleh aparat penyidik. Perintah untuk menghadirkan seorang ahli yang berhubungan dengan kejahatan hak cipta tersebut jarang ataupun mungkin tak pernah dilakukan. Di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera jarang terdengar adanya perkara-perkara seputar tindak pidana hak cipta. Padahal menurut UHC Indonesia polisilah yang menjadi aparat terdepan untuk "membentengi" kejahatan hak cipta setelah dirumuskan pelanggaran hak cipta itu sebagai delik biasa.<sup>80</sup>

Sedangkan tugas dan wewenang penyidik yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil, meliputi:<sup>81</sup>

- a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta
- b. Melakukan penelitian terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan pencatatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta

Penyidik Hak Cipta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil selain bekerja di lingkungan Departemen Kehakiman juga berasal dari lingkungan Departemen terkait, yang ada hubungannya dengan perlindungan hak cipta. Pengangkatan Penyidik Hak Cipta dapat saja dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta Departemen yang ada kaitannya dengan perlindungan hak cipta, misalnya Departemen Pendidikan Nasional, Departemen yang membawahi bidang Telekomunikasi dan Penyiaran, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan lain-lain sebagainya.<sup>82</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Hak Cipta yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, namun ia dapat menyampaikan laporan temuan tersebut kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, kalau memang diperlukan pihak yang disebut terakhir ini dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan. Khusus dalam hal

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

pelaku tindak pidana di bidang hak cipta tertangkap tangan, Penyidik Hak Cipta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian dan penagkapa itu untuk paling lama 1 hari.<sup>83</sup>

Untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang Penyidik Hak Cipta yang melakukan penangkapan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, Departemen Kehakiman setempat atau Kepada Kantor Wilayah Departemen terkait tempat instansi asal penyidik untuk mendapatkan surat perintah tugas penyidikan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat. Tanpa surat perintah penyidikan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman penyidikan tidak dapat dilakukan. Ini dimaksud untuk menjaga agar jangan terjadi penyidikan “liar” yang dilakukan oleh para petugas gadungan. Selain itu tugas penyidikan itu hanya dapat dilakukan di daerah wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang dimaksudkan. Khusus untuk penyidikan oleh Penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Paten dan Hak Cipta, hanya dapat dilakukan dengan surat perintah tugas penyidikan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Penyidik Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan di atas berwenang:<sup>84</sup>

- a. Melaksanakan tugasnya di seluruh wilayah Indonesia
- b. Melaksanakan tugasnya dalam hal terjadi beberapa tindak pidana di bidang hak cipta yang saling berkaitan dan yang dilakukan di dalam daerah hukum dan atau lebih Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan tugas dimaksud sebaiknya dilakukan secara bekerja sama dengan Penyidik Hak Cipta pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyidikan tersebut. Hasil penyidikan itu untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi yang berwenang melakukan proses penegakan hukum, oleh karena itu penyidik Pegawai Negeri Sipil, wajib:<sup>85</sup>

- a. Memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian
- b. Memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik kepolisian
- c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan kebutuhan kepada penyidik kepolisian
- d. Memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian, apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Selanjutnya penyitaan terhadap barang bukti, hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Hak Cipta dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang sebelumnya harus dilengkapi dengan pengajuan surat permohonan izin untuk melakukan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kejadian tindak pidana hak cipta atau di tempat yang banyak diketemukan barang bukti. Surat permohonan izin penyitaan sebagaimana dimaksudkan harus diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah departemen Kehakiman dan tembusannya

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

dikirimkan kepada Penyidik Kepolisian setempat dan instansi terkait tempat penyidik Pegawai Negeri Sipil itu berasal.<sup>86</sup>

Namun dalam keadaan mendesak Penyidik Hak Cipta harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat iin terlebih dahulu, Penyidik Hak Cipta dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Barang sitaan sebagaimana dimaksudkan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara setempat, dan apabila rumah sedemikian tidak ada benda sitaan disimpan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atau instansi tempat penyidik Pegawai Negeri Sipil itu berasal. Berkas hasil penyidikan untuk selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian, yang memuat:

- a. Sampul berkas perkara
- b. Daftar isis berkas perkara
- c. Surat perintah tugas penyidikan
- d. Resume pemeriksaan
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
- f. Berita acara pemeriksaan tersangka
- g. Berita acara penyitaan barang saksi
- h. Berita acara penyitaan barang bukti
- i. Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
- j. Daftar tersangka, saksi dan barang bukti

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

- k. Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila berita acara pemeriksaan yang telah diserahkan dianggap belum lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik melengkapi berita acara tersebut dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian. Setelah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dikirimkan, Penyidik Hak Cipta dapat menanyakan kepada penuntut umum tentang pelimpahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri. Setelah itu selesailah tugas penyidika dan untuk itu kepada penyidik diwajibkan melaporkan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Kepala Kantor Wilayah Departemen selanjutnya melaporkan kepada Menteri Kehakiman.<sup>87</sup>

Untuk Penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Jenderal HAKI laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada penuntut umum. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan selanjutnya melaporkannya kepada Menteri Kehakiman. Penyidik bertanggungjawab sepenuhnya atas penyidikan yang telah dilakukannya. Tanggungjawab ini tidak hanya menyangkut materi penyidikan, tetapi lebih jauh bertanggungjawab juga secara moral atas profesi yang disandangnya. Karena itu tugas penyidikan harus penuh dengan kecermatan, kejujuran serta didasarkan pada panggilan nurani untuk mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan. Penyidikan adalah sebagian

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

dari proses dalam peradilan pidana. Setelah tugas penyidikan itu selesai proses selanjutnya adalah penuntutan yang tunduk pada kaedah normative UU No. 8 Tahun 1981. Keputusan Hakim Pengadilan Negeri adalah tahap akhir dari proses peradilan, meskipun setelah itu masih ada upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali.<sup>88</sup>

### 3. Penyelesaian Sengketa

Sengketa mengenai hak cipta dapat terjadi apabila ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 112 sampai dengan Pasal 120.<sup>89</sup> Dalam pasal 112 yang berbunyi setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>90</sup> Pasal 7 ayat (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.<sup>91</sup>

Pasal 52: Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana control teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Richard G. E. Rumbekwan, Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga, dalam Jurnal *Lex Crimen*. Vol.5 No.3. Maret 2016, h.130.

<sup>90</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>91</sup> Richard G. E. Rumbekwan, *Loc.Cit.*



lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.<sup>92</sup> Pasal 9 ayat (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Pasal 10: Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.<sup>93</sup>

Pasal 12:<sup>94</sup>

1. Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
2. Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 25 ayat (3) Setiap Orang dilarang melakukan dengan tujuan komersial atas Lembaga Penyiaran. Pasal 50: Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara. Pasal 54: Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*, h.131.

Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan.<sup>95</sup>

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55:<sup>96</sup>

1. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
2. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

4. Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 74 ayat (1) huruf (d) melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.<sup>97</sup>

Pasal 98:<sup>98</sup>

1. Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
2. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Sengketa akibat pelanggaran terhadap hak cipta akan terjadi apabila ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120.<sup>99</sup> Akibat pelanggaran terhadap hak cipta sangat merugikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Apabila

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

hal ini dibiarkan dan tidak dilindungi, maka para Pencipta dan pemegang hak cipta akan kehilangan motivasi untuk lebih kreatif membuat karya cipta yang baru, padahal hasil ciptaan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>100</sup> Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dngan masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dapat dicegah dan apabila pelanggaran tersebut terjadi, maka sanksi hukum dapat diberlakukan bagi pelakunya.<sup>101</sup>

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris *conflict* yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan dan atau pencerdasan, sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan. Sengketa, yaitu sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatanannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.<sup>102</sup> Sehingga, dapat dikatakan bahwa sengketa terjadi apabila pihak yang merasa dirugikan menuntut untuk dipulihkan haknya yang telah dirugikan oleh pihak yang merugikan tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa:

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, h.132.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

**Kewenangan Pengadilan**

Pasal 95:<sup>103</sup>

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96:<sup>104</sup>

1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

3. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97:<sup>105</sup>

1. Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98:<sup>106</sup>

1. Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
2. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99:<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*, h.133.

<sup>107</sup> *Ibid.*

1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
  - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

### **Tata Cara Gugatan**

Pasal 100:<sup>108</sup>

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*



2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101:<sup>109</sup>

1. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
3. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

4. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

### **Upaya Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Upaya Hukum. Pasal 102:<sup>110</sup>

1. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
4. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
5. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103:<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, h.134.

1. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
2. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitra Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
3. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
4. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
5. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104:

1. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
2. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan Puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

3. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
4. Juru sit Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105: Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.<sup>112</sup>

#### **Penetapan Sementara Pengadilan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Penetapan Sementara Pengadilan. Pasal 106: Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karna pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:<sup>113</sup>

- a. Mencegah masukny barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan.
- b. Menarik dari peredaran dan mnyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut.
- c. Mengamankan barang bukti dan penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau mencegah
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*, h.134-135.

Penjelasan Pasal 106 huruf (d) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.<sup>114</sup>

Pasal 107:<sup>115</sup>

1. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
  - b. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
  - c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
  - d. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
  - e. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenal penetapan sementara.

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

2. Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, di antaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>116</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 108:<sup>117</sup>

1. Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
2. Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.

3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
4. Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
5. Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109:<sup>118</sup>

1. Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (a), Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, h.136.



2. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
4. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
  - a. Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan.
  - b. Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
  - c. Pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
5. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib disrahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang

dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Menurut Kamus Hukum, Perbuatan melanggar hukum: perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga termasuk didalamnya perbuatan yang bertentangan dengan moral dan kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan melawan hukum: tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.<sup>119</sup>

#### **D. CONTOH KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA DESAIN FESYEN**

CV.Rabbani merupakan perusahaan garment yang bergerak dalam bidang retail busana muslim dengan tagline Profesor Kerudung Indonesia. Rabbani merupakan salah satu perusahaan kerudung instan pertama dan terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan produk andalan berupa kerudung instan. Selain itu, terdapat produk lain yang juga telah dikembangkan yaitu busana muslim diantaranya kemko, tunik, kastun, kemko, tunik serta perlengkapan lain seperti ciput/inner kerudung dan aksesoris.<sup>120</sup>

Sewaktu awal didirikan, Rabbani ingin merubah paradigma sebagian besar masyarakat yang memandang bahwa wanita yang memakai busana muslim itu kurang modis. Untuk itu Rabbani ingin menunjukkan bahwa wanita yang memakai busana muslim itu modern dan terhormat serta tampil gaya dan *trendy* yang syar'i. Namun di sisi lain, Rabbani juga menghadapi tantangan yang besar.

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> <https://www.rabbani.co.id>, diakses pada 14 Mei 2018.

Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu wanita yang memakai busana muslimah masih jarang dan belum menjadi trend seperti sekarang.<sup>121</sup>

Asal kata Rabbani terilhami dari salah satu surat di kitab suci Al-Qur'an yaitu surat Ali Imronayat 79 yang artinya adalah para pengabd Allah yang bersedia mngajarkan dan diajarkan kitab Allah.<sup>122</sup>

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

Artinya: "Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia Berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, Karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya."<sup>123</sup>

Visi secara global rabbani ada tiga yaitu, visi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Visi jangka panjang Rabbani yaitu berjumpa dengan Allah di Surga Firdaus. Misi jangka menengah Rabbani yaitu membangun peradaban kerudung dunia 2020. Visi jangka pendek adalah menjadi professional mujahid. Sedangkan visi spesifik Rabbani yaitu menjadi perusahaan kerudung terbaik dan terbesar di dunia tahun 2020. Sedangkan misi Rabbani adalah menshibghoh fashion dunia dengan Syariah.<sup>124</sup> Bukti bahwa Rabbani telah menshibghoh (mewarnai) fashion dunia dengan Syariah adalah dengan menghasilkan produk desain busana muslim terutama busana muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu ketentuan pakaian yang harus tebal, contoh produk Rabbani yang sesuai syariat Islam penulis lampirkan pada

<sup>121</sup> Ibid.

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Q.S. Ali-Imran (3): 79.

<sup>124</sup> Ibid.

halaman lampiran (Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 4). Selain itu, bukti lainnya yaitu bahwa Rabbani melakukan pemasarannya melalui kantor cabang, saat ini CV.Rabbani Asysa (Rabbani) memiliki 141 reshare atau cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kantor pusat Rabbani berlokasi di Jl. Citarum No 20 A Bandung, dengan nomor Telp. 022-7234254. Dan memiliki website resmi yaitu *www.rabbani.co.id*. Sehingga, dari jumlah kantor cabang tersebut membuktikan bahwa Rabbani cukup menguasai fashion Indonesia, dan bukti logo yang biasa digunakan pada produk Rabbani serta bukti alamat lengkap kantor pusatnya, penulis lampirkan pada halaman lampiran (Gambar 3).<sup>125</sup>

Tujuan Rabbani adalah menjadi retailer terpercaya dimanapun berada dengan memberikan standar yang tinggi untuk produk, jasa pelayanan dan sikap kepada seluruh pelanggan. Seluruh karyawan Rabbani Holding mendukung sepenuhnya pengembangan dan pemeliharaan budaya kualitas produk, untuk terus menerus meningkatkan standard kualitas produk, untuk meminimalisasi kegagalan dalam proses produksi dengan menitikberatkan pada pencegahan dengan memproduksi dengan baik dari awal dan untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan mengurangi pengembalian produk ke perusahaan.<sup>126</sup>

Berbagai tujuan Rabbani memiliki berbagai kendala, salah satunya masalah pembajakan desain maupun logo. Dalam acara undian pemenang utama Gebyar Melimpah Hadiah Rabbani (Gempar) pada Sabtu tanggal 22 Juli 2017 di Store Rabbani 2 Jalan Buahbatu, Promotion and Design Manager Rabbani, Ridwanul Karim menyebutkan bahwa konsumen sebaiknya hati-hati dalam

---

<sup>125</sup> [https:// www.rabbani.co.id](https://www.rabbani.co.id), diakses tanggal 14 Mei 2018.

<sup>126</sup> *Ibid.*

membeli produk, karena produk tiruan bahkan pemalsuan brand Rabbani sudah banyak sekali, Ridwanul Karim menghimbau konsumen agar lebih jeli.<sup>127</sup>

Penulis mengutip kasus yang diberitakan oleh [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), pada tanggal 10 November 2016 menyebutkan bahwa maraknya pembajakan atau pemalsuan merek yang menyasar produk lokal kian tak terkendali. Kendati proses hukum sudah dilakukan, aksi pembajakan atau pemalsuan merek sulit dihentikan, bak jamur di musim hujan.<sup>128</sup> Regional Sales Manager Rabbani Area Jawa Barat, Memet Pardiansyah, mengatakan bahwa produk kerudung sekolah Rabbani adalah salah satu yang paling banyak dibajak atau dipalsukan. Hal itu tidak terlepas dari popularitas produk tersebut di kalangan murid sekolah dan orang tua siswa. "Saat ini produk kerudung sekolah memberikan kontribusi hingga 80% bagi Rabbani. Banyak murid dan orang tua murid yang memilih produk kerudung sekolah Rabbani untuk seragam seolah," ujar Memet di Rabbani Jalan Buahbati, Bandung, Kamis 10 November 2016.<sup>129</sup>

Posisi kerudung sekolah Rabbani sebagai market leader, menurut dia, membuat banyak pihak tergiur untuk menjiplak desain lengkap dengan logo Rabbani. Kalaupun tidak persis sama, dikatakan Memet, ada juga yang menggunakan logo sangat mirip dengan Rabbani, hingga bisa mendorong konsumen untuk menganggapnya sebagai produk Rabbani.<sup>130</sup> Memet berkata, bahwa jika hanya menjiplak modelnya saja, tidak dikategorikan pembajakan. menurutnya tidak terlalu mempersoalkan hal itu. Namun, yang sangat menjadi

---

<sup>127</sup> <https://www.rabbani.co.id.27/07/2017>, diakses 14 Mei 2018.

<sup>128</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com.2016/11/10>, diakses pada 14 Mei 2016.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*

persoalan baginya adalah bahwa banyak yang menjiplak logo atau membuatnya sangat mirip. Menurut ini yang dikategorikan pembajakan.<sup>131</sup>

Untuk memberantas aksi pemalsuan atau pembajakan tersebut, menurut dia, Rabbani sudah menempuh jalur hukum. Sejumlah produsen dan toko yang terbukti melakukan pelanggaran sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Diantara mereka ada yang sudah mendapatkan sanksi dan ada jua yang masih dalam proses hukum. Menurut informasi dari Memet, menyatakan bahwa ada yang sekalian tokonya, ada juga yang produsennya. Menurut pula bahwa beberapa produk palsu itu hadir karena permintaan toko, sedangkan menurutnya, bahwa secara nyata merk Rabbani sudah terdaftar dan sudah dipatenkan.<sup>132</sup>

Masih menurut Memet, bahwa produk kerudung sekolah palsu Rabbani, ada yang dijual mulai dari harga Rp15.000- Rp25.000. sedangkan produk asli berada pada rentang harga Rp60.000- Rp80.000 per buah. Lebih dalam Memet menyebutkan bahwa, sebenarnya tidak sulit untuk membedakan produk asli dan palsu. Dari kualitas bahan juga jauh berbeda. Asumsi Memet bahwa konsumen sendiri sudah cukup teredukasi.<sup>133</sup>

Lebih jauh Memet menuturkan bahwa mata rantai pembajakan atau pemalsuan tak kunjung putus. Hingga saat ini pemalsuan produk unggulan Rabbani masih terus terjadi. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti berapa besar potensi kerugian yang ditimbulkan. Masih menurut memet, bahwa kerugian ditaksir cukup besar, Rabbani sendiri sudah memperbanyak gerai dan

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

mitra hingga ke tingkat kecamatan, sebagai upaya untuk memutus rantai pembajakan atau pemalsuan.<sup>134</sup>



---

<sup>134</sup> *Ibid.*



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Konstruksi Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005**

Konstruksi Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI No 1/munas vii/mui/15/2005 Adalah:

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliaannya, untuk member persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.<sup>1</sup>
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikannya lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasi Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil.<sup>2</sup>
3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oeh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu

---

<sup>1</sup> Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37, h.469.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.470.

tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>3</sup>

4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>4</sup>
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>5</sup>
6. Hak atas Merk, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.<sup>6</sup>
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Kekayaan Intelektual merupakan anugerah yang berasal dari Allah swt, untuk dipergunakan semaksimalnya agar dapat berguna bagi diri pribadi maupun lingkungannya. Kekayaan Intelektual juga merupakan buah pikiran, buah akal, dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

buah dari rasa yang dimiliki manusia yang diekspresikan dalam bentuk benda berwujud contohnya seperti suara, gambar, patung, dan tulisan. Kekayaan Intelektual yang berasal dari proses kerja berfikir manusia tersebutlah yang menyebabkan tidak sembarang insan memilikinya dan dapat dikatakan mampu berkarya, sehingga Kekayaan Intelektual tergolong Hak Milik pribadi yang harus dilindungi. Oleh karena itu, di Indonesia organisasi masyarakat yaitu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual tersebut didalam Fatwa MUI No. 1 MUNAS VII/MUI/15/2005.

Fatwa tersebut menyatakan pengharaman yang tegas untuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual seperti, menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak. Karena, menurut fatwa tersebut berdasarkan pertimbangan yang diambil MUI bahwa pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. Pertimbangan yang diambil pula berdasarkan permohonan Masyarakat Anti Pemalsuan (MIAP) kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa. Dan berdasarkan dari pihak MUI sendiri yang merasa perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, sebagai pedoman umat Islam khususnya dan pihak-pihak yang memerlukan umumnya. Referensi yang digunakan MUI yang meliputi:

1. Q.S. Al-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>8</sup>

2. Al-Baqarah: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”<sup>9</sup>

3. Q.S. Asy-Syu'ara: 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>10</sup>

4. Q.S. Al-Baqarah 279 yang berbunyi:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Q.S al-Nisa: (29): 4.

<sup>9</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 188.

<sup>10</sup> Q.S. Asy- Syu'ara (26): 183.

<sup>11</sup> Q.S. al- Baqarah (2): 279.

5. Berdasarkan Hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan<sup>12</sup>

خَطَبَنَا رَسُولٌ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا وَلَا يَجِلْ لِأَمْرِي مِنْ مَالٍ  
خِهُ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya;  
“Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya  
kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad)

6. Hadis-hadis larangan berbuat Dzalim:<sup>13</sup>

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا  
فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...” (H.R. Muslim)

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.”

7. dan Qawa'id fiqh:<sup>14</sup>

- a. Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.
- b. Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.
- c. Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.
- d. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.

<sup>12</sup> Ma'rif Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37, h.464.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.465.

MUI juga menganggap bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu *Huquq Maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).<sup>15</sup> Selain itu, MUI juga memperhatikan mengenai al-Huquq al-Ma'nawiyah, bahwa nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern ini hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Menurut Fatwa MUI tersebut pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Berdasarkan data yang penulis temukan, dapat dinyatakan bahwa ekspresi gagasan pada ide yang dimiliki manusia dalam himpunan ekonomi kreatif menjadikan sumber daya baru bagi dunia, termasuk Indonesia. yang Kepemilikan merupakan bagian penting dalam pembahasan hukum ekonomi Islam. Para ulama juga berpendapat bahwa hak cipta atau ciptaan yang orisinal dan bermanfaat tergolong harta yang berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam). Berkenaan dengan hak kepengarangan, berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara'/hukum Islam

---

<sup>15</sup> Berdasarkan landasan teori pada Bab II, h.110.

atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya. Dalam konsep Islam, Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya. Dia pencipta bumi dengan segala isinya termasuk manusia. Oleh karena itu, kepemilikan manusia tidak bisa menghapus kepemilikan Allah yang abadi.<sup>16</sup> Untuk itu, atas harta kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia harus dibelanjakan demi pengabdian terhadap kesejahteraan dan ketenteraman kehidupan manusia.<sup>17</sup>

Hak Kekayaan Intelektual tergolong pada *ghair mal* yang diturunkan lagi pada *Hak 'Aini* (Hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua). Dan dari *hak 'aini* tersebut di kerucutkan lagi menjadi *Haq Al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Tidak semua orang dapat mampu mempekerjakan otaknya untuk menalar dan menciptakan sesuatu, sehingga perlu dilindungi.

Dalam berkarya, Islam memandang bahwa kepemilikan karyanya tergolong *ihrazul mubahat*. Yang dimaksud dengan *ihrazul mubahat* adalah

---

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.194.

<sup>17</sup> *Ibid.*



memiliki sesuatu benda yang memang dapat/boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan. Adapun yang dimaksud dengan *boleh* atau mubah adalah harta (benda) yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tak ada pula sesuatu penghalang yang dibenarkan oleh syariah dari memilikinya. Hasil dari usaha yang nyata baik pribadi maupun kelompok.<sup>18</sup>

Islam menetapkan pemilikan hanya bisa ada dengan wewenang dari pembuat syariat, yang disertai mengurus urusan-urusan masyarakat. Pada hakikatnya, pembuat syariat itulah yang memberikan harta milik kepada manusia dengan pengaturannya melalui syariat. Pemilikan hanya bisa ada dengan ketetapan dari pembuat syariat (pembuat undang-undang) adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama fikih. Sebab semua hak, termasuk hak pemilikan, tidak bisa ada kecuali dengan adanya pengukuhan atasnya dari pembuat syariat, dan ketetapannya atas sebab-sebab pemilikan tersebut. Oleh sebab itu, hak tersebut tidaklah timbul dari sifat-sifat benda-benda itu sendiri, tetapi dari izin pembuat syariat yang menjadikannya memerlukan dasar-dasar syari'at.<sup>19</sup>

Beberapa kriteria ketentuan dan batasan dalam proses dan pendayagunaan kepemilikan individu tersebut, salah satunya yaitu kepemilikan yang ada, dalam area yang tidak menimbulkan *kemadharatan* bagi kehidupan masyarakat. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat

---

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h.9-10.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.8.

dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.<sup>20</sup>

Perlindungan Hak kekayaan Intelektual dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tidak terlepas dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual seperti hak varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak terpadu, hak paten, hak merek, dan hak cipta. Perlindungan yang ada di dalam fatwa MUI tersebut meskipun sejalan dengan hukum positif yang berlaku, dalam fatwa tersebut lebih melindungi hasil orisinil yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, demi kemaslahatan umum. Lebih melindungi hasil karya orisinil yang tidak bertentangan dengan hukum Islam supaya antara ketentuan hukum Islam yang satu harus selaras dengan hukum Islam yang lainnya. Contohnya seperti hukum berpakaian muslimah tidak boleh ketat, maka hukum membuat baju ketat adalah tidak boleh, karena untuk menghindari bahaya, sesuai qawa'id fiqh yang juga digunakan oleh MUI dalam telaahannya untuk menetapkan hukum yaitu yang berbunyi: "Bahaya (kerugian) harus di hilangkan". Berdasarkan teori yang penulis utarakan dan juga pendapat penulis searah dengan pernyataan World Intellectual Property Organization (WIPO) yang diterbitkan dan diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, sebuah karya haruslah merupakan karya asli (benar-benar merupakan

---

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h.199-200.

ekspresi asli dari penciptanya, yaitu, karya tersebut diciptakan sendiri tidak meniru karya orang lain atau matri-materi yang sudah menjadi publik domain<sup>21</sup>.

Berdasarkan pertimbangan, peringatan, perhatian, dan keputusan MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam landasan teori BAB II, maka pelanggaran HKI pada contoh kasus yang penulis jabarkan di BAB III yaitu kasus Butik Rabbani yang telah dilanggar Hak Kekayaan Intelektualnya merupakan perbuatan yang mendzolimi pihak rabbani karena sangat merugikan, dan tergolong perbuatan yang haram bagi pelanggarnya.

#### **B. Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap Perlindungan Hak Cipta pada Subsektor Ekonomi Kreatif Desain Fesyen Busana**

Pelanggaran Hak Cipta kerap kali terjadi di Indonesia. Sebagaimana penulis muat dalam teori BAB II tentang Hak Cipta dan di BAB III mengenai contoh kasusnya yang penulis ambil dari Butik Rabbani. Pelanggaran yang terjadi di Butik Rabbani sangat meresahkan bagi pihak tersebut. Sebagai solusinya pihak Butik Rabbani melakukan tindakan hukum agar pelanggar jerah. Kemudian pihak Butik Rabbani juga menambah cabang-cabang di berbagai kota untuk meminimalisir tingkat pembajakan.

Fesyen atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *fashion* merupakan salah satu bidang dalam industri kreatif yang keberadaannya sedang berkembang di Indonesia sebagaimana telah penulis uraikan pada BAB III. Dalam industri

---

<sup>21</sup> Kamil Idris, *Ekspresi Kreatif (Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Usaha Kecil Dan Menengah)* (Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008), h.12.

kreatif sangat syarat dengan kreativitas dan inovasi. Banyak desainer yang menciptakan desain-desain *fashion* yang menarik serta diminati banyak kalangan. Desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda, misalnya busana. Desain dari sebuah *fashion* merupakan hasil ide dan kreatifitas dari seorang desainer yang patut dilindungi dan dihargai.<sup>22</sup> Industri kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual (*intellectual property*) menjadi nilai ekonomi tinggi yang tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.<sup>23</sup> Ruang lingkup perlindungan desain sangat luas, sehingga banyak bersinggungan dengan bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, hak paten dan hak merek. Kondisi tersebut menyebabkan peraturan mengenai desain khususnya desain fesyen banyak berkaitan dengan ketentuan hak atas kekayaan intelektual lainnya.<sup>24</sup>

Penulis seiring dengan pendapat Prof. Abdul Qadir Muhammad, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang dijemlakan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau Invensi. Ciptaan atau Invensi tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt). Hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif

---

<sup>22</sup> Fihatul Aidiyah, *Op.Cit.*, h.Abstrak.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.2.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.11.

pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan Ciptaan atau Invensi baru. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan immaterial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal.<sup>25</sup> Sedangkan menurut M. Musyafa' sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam hukum nasional kita, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Dalam tulisannya dimuat pula pernyataan Yusuf al-Qardawi, bahwa tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Al-Qur'an yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya.<sup>26</sup>

Perlu ditegaskan bahwa, subsektor ekonomi kreatif fesyen yang berkaitan dengan kreasi desain fesyen lebih tepatnya dalam pembuatan pakaian non muslimah dan pakaian muslimah sangat mengedepankan kreativitas, inovasi, dan penemuan baru dari penciptanya, oleh sebab itu disebutlah sebagai ekonomi kreatif. Disamping itu dalam hukum Islam telah ditentukan bagaimana hukum berpakaian bagi muslimah, sehingga jawaban dari pertanyaan yang jika dikaitkan dengan perlindungan Islam tentang hak kekayaan intelektual, penjelasan atas perbedaan perlindungan hukumnya adalah, dalam membuat pakaian muslimah merupakan perkara yang sangat dilindungi, sehingga tidak boleh ada pihak yang melanggar. Dan perlindungan hukum pembuatan pakaian non muslimah menurut fatwa MUI adalah perkara yang tidak dilindungi. Pernyataan tersebut penulis ambil berdasarkan ketentuan hukum dari Fatwa MUI No. 1 MUNAS

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet II, 2007), h.11.

<sup>26</sup> M. Musyafa', Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol.5 No.1. Januari 2013, h.45.

VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual angka 2 yang menyatakan *"HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam"*. HKI tersebut yaitu yang di pandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (harta kekayaan).<sup>27</sup> Meskipun pembuatan pakaian baik pakaian muslimah maupun pakaian non muslimah merupakan salah satu kegiatan yang sama-sama membutuhkan ide kreatif dan *skill* untuk menghasilkan pakaian yang memiliki nilai jual (nilai ekonomi) dan banyak diterapkan di masyarakat Indonesia, namun Islam memandang hukum membuat pakaian non muslimah adalah hal yang membahayakan. Disebut bahaya karena akan menjadi alternatif konsumen dalam membeli dan menggunakan pakaian. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi "bahaya harus dihilangkan", tertuang dalam hal yang menjadi ingatan fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, yang penulis utarakan di BAB II halaman 106.

Dapat disebutkan pula, bahwa pembuatan pakaian non muslimah berarti akan tidak sesuai dengan kriteria pakaian muslimah yang di wajibkan dalam Islam, yang menurut Hannan Athiyah Ath-thuri menyatakan bahwa kriteria busana muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, pertama yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dengan kedua telapak tangan, kedua tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh, ketiga tidak tipis dan tembus pandang sehingga menampakkan kulit tubuh, keempat tidak menyerupai pakaian laki-laki, kelima tidak mencolok dan berwarna yang dapat menarik perhatian, dan keenam

---

<sup>27</sup> Berdasarkan teori yang penulis uraikan di Bab II, h.115.

tidak menyerupai pakaian kafir.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, pembuatan desain pakaian non muslimah dapat ditarik benang merah untuk dinyatakan tidak sesuai syariat Islam atau bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga, menurut fatwa MUI hasil karya yang tidak sesuai syariah tidaklah dilindungi. Perlu diingat bahwa Allah telah memerintahkan wanita untuk berbusana muslimah, yaitu dalam Q.S. Al-Ahzab (59), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>29</sup>

Mengenai contoh kasus dapat ditarik benang merah bahwa desain fashion dari Butik Rabbani telah diperlakukan dengan tindakan yang menyakiti dan merugikan, sebagaimana pengakuan yang diutarakan oleh pihak Butik Rabbani yang penulis muat dalam contoh kasus pada BAB III. Karena pada kasus yang dialami Butik tersebut sudah menjadi rahasia umum, bukan hanya desainnya saja yang ditiru namun logo dari Butik Rabbani tersebut juga ditiru yang sangat mendekati kemiripan, sebagaimana yang penulis utarakan di BAB III secara spesifik. Desain fesyen busana muslimah yang di jual oleh Butik Rabbani telah memenuhi kriteria seperti yang diutarakan oleh salah satu ilmuwan muslim yaitu Hannan Athiyah Ath-thuri diatas, dan dapat pula dilihat produk dari Butik

<sup>28</sup> Listiani, *Motivasi Siswi Dalam Mengenakan Busana Muslimah di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat* (Bandar Lampung: FTK UIN Raden Intan Lampung, 2017) h.28.

<sup>29</sup> Q.S. Al-Ahzab (33): 59.



Rabbani yang penulis lampirkan pada halaman lampiran Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4. Sehingga secara hukum Islam berdasarkan Fatwa MUI No. 1 MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pihak Butik Rabbani mendapatkan perlindungan hukum.

Sebagaimana pengakuan pihak Butik Rabbani bahwa produknya telah memiliki HKI yang dilindungi, dan secara hukum Islam juga terlindungi, sehingga apabila pihak Butik Rabbani mengajukan perkara di Pengadilan Niaga, maka sudah sah secara hukum Islam dan hukum positif. Dan penempuhan jalur hukum telah dilakukan oleh pihak Butik Rabbani, akibatnya pelanggar (baik toko dan produsen pembajak) mendapat sanksi sesuai UU yang berlaku. Menurut pihak Butik Rabbani mereka berhak karena merk Rabbani sudah terdaftar dan sudah dipatenkan, mereka juga berhak mengajukan perkara karena sudah merasa sangat dirugikan.

Mengenai penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pendaftarannya, digunakan undang-undang HKI yang berlaku, untuk pendaftaran diberlangsungkan di Departemen Hukum dan HAM di provinsi masing-masing, dan kemudahan untuk mendaftar cukup registrasi daring atau *online* melalui laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id> cara ini aman dan tepat karena akan terhubung langsung ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual pusat<sup>30</sup>, dan jika sudah dipastikan terdaftar maka saat mengalami pelanggaran karya seperti kasus yang dialami oleh pihak Butik Rabbani ialah kasus pelanggaran yang setiap jenis HKI-nya berkaitan, seperti bagian Desainnya dilindungi dengan UU Desain Industri, pada logo yang

---

<sup>30</sup> <https://bplawyers.co.id/2018/02/07/>, diakses pada 27 Juni 2018.

dilanggar digunakan UU Hak Cipta, pada merknya digunakan UU Hak Merk. Sebagaimana yang penulis utarakan dalam teori BAB II halaman 80. Penyelesaian sengketa HKI secara hukum positif tidaklah ditentang oleh Fatwa MUI, karena menurut Fatwa MUI tersebut bahwa HKI adalah yang berguna bagi manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai Ekonomi Kreatif pada subsektor Fesyen bidang desain busana, lebih tepatnya busana muslimah dan busana non muslimah, bahwa penulis telah memaparkan pada BAB III, bahwa pemerintah sedang mengembangkannya sebagai sumber daya terbaru setelah melalui 3 gelombang yaitu dari gelombang pertanian beralih pada gelombang industrialisasi, kemudian beralih ke gelombang informasi, dan terakhir yang sedang berkembang adalah gelombang ekonomi kreatif yang diwadahi dengan industri kreatif. Sebagaimana telah diuraikan pada Landasan Teori BAB II, hubungan Hak Kekayaan Intelektual dengan Industri Kreatif sangat erat sekali, karena sama-sama mengandalkan buah fikiran dari manusia untuk di perdayakan. Dari hal itu, dapat ditarik benang merah bahwa sebagai umat Islam kita harus menghargai kreativitas saudara kita yang telah mengeluarkan dan menciptakan karya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti contohnya kita tidak boleh melakukan pelanggaran HKI yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Butik Rabbani, dan bahkan dapat merugikan perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia jika kita terus tidak saling menghargai, jika kita bersikap ingin mengambil keuntungan sepihak. Menurut penulis, jika kita ingin negara kita maju, kita pribadilah yang sebaiknya terus

menempah diri agar selalu berkreasi dan berinovasi dalam hal kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut penulis yang berdasarkan data pada BAB III, dan teori-teori di BAB II, jika pemerintah yang sedang mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia menginginkan kemajuan yang pesat, maka aspek hukumnya harus benar-benar kuat, karena menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu, meskipun sudah banyak aturan dalam segi kehidupan, namun pada realitanya tetap terjadi pelanggaran, seperti contoh yang dialami Butik Rabbani sebaiknya benar-benar ada UU yang mengatur tentang Ekonomi Kreatif, tidak hanya menggunakan UU lain yang telah ada saja, contohnya seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,<sup>31</sup> karena menurut penulis relevansinya antara UU yang sudah ada dengan bukti lapangan mengenai Ekonomi Kreatif kurang mengena, jadi sebaiknya lebih mempercepat alur kerja untuk meresmikan RUU tentang Ekonomi Kreatif, agar lebih mengikat dan semakin tegas lagi, misalnya untuk contoh kasus pelanggaran yang dialami oleh Butik Rabbani merupakan realita bahwa meskipun ada peraturan yang berlaku dan meskipun MUI sudah mengharamkan pelanggaran HKI, tetap saja ada yang melanggar. Jadi, menurut penulis sebaiknya pemerintah membuat Pasal pada UU Ekonomi Kreatif yang intinya menyatakan bahwa “Setiap anggota masyarakat maupun badan hukum adalah pengawas bagi

---

<sup>31</sup> <http://www.bekraf.go.id/berita.com>, diakses 27 Juni 2018.

masyarakat dan badan hukum lainnya, sehingga jika memiliki bukti yang cukup dapat melaporkan kasus yang di amatinya kepada pihak yang berwajib, dan jika perkara sudah di putus, maka pihak pelanggar akan membayar denda 2 (dua) kali lipat dari kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, denda tersebut digunakan untuk memberi imbalan pada pelapor sebesar 30%, digunakan untuk mengganti kerugian pihak yang dirugikan 50%, dan mengganti biaya-biaya yang dihabiskan untuk mengurus perkara 20%”. Dari Pasal yang penulis utarakan, menurut penulis dapat sangat mengurangi tingkat pelanggaran hukum, membuat pelanggar takut, dan membuat pelanggar jera. Sehingga pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berjalan lebih lancar dan pesat, pihak penguang ide yang berkarya juga akan merasa aman dalam berkarya karena merasa terlindungi dan merasa dihargai oleh pemerintah, masyarakat dan badan hukum. Sesuai dengan anjuran Islam untuk menyarankan hambah-Nya agar berkarya, yaitu Q.S. Ar Ra'd ayat (11):

لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنَ الْوَالِ ۝۱۱

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Q.S. Ar-Ra'd (13): 11.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis penuli, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa:

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 sangat dilindungi. Fatwa tersebut sangat seiring dengan hukum positif yang diberlakukan di Indonesia. Konstruksi Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yaitu Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak atas Merek, dan Hak Cipta. Perlindungan HKI dari MUI lebih kepada hasil yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perlindungan HKI dari MUI lebih kepada hasil yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Fatwa MUI tersebut, subsektor ekonomi kreatif desain fesyen busana muslimah seperti yang dipasarkan oleh Butik Rabbani sangat dilindungi, apabila perlindungan tersebut dilanggar maka perbuatan pelanggar di golongankan perbuatan haram. Sedangkan busana non muslimah tidak dilindungi, karena bertentangan dengan hukum Islam (Syariah). Sehingga, pembajakan produk yang dialami Butik Rabbani semestinya tidak terjadi lagi.

## B. SARAN

1. Untuk eksistensi hukum Islam, fatwa MUI hendaknya dapat dipertahankan sebagai salah satu referensi masyarakat muslim Indonesia.
2. Untuk eksistensi hukum Islam yang lebih intens pada masyarakat, maka hendaknya di era globalisasi yang terus menuntut kreativitas intelektual masyarakatnya, Fakultas Syariah hendaknya terus mengedukasi masyarakat dengan media sosial yang ada mengenai perbedaan membuat busana muslimah dan hukum membuat busana non muslimah. Ekonomi Kreatif di Indonesia jika kita terus tidak saling menghargai, jika kita bersikap ingin mengambil keuntungan sepihak. Menurut penulis, jika kita ingin negara kita maju, kita pribadiilah yang sebaiknya terus menempah diri agar selalu berkreasi dan berinovasi dalam hal kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
3. Menurut penulis, sebaiknya pajak produk lokal yang dibutuhkan masyarakat jangan terlalu besar, jika pajak besar maka harga produk akan mahal, dan kesulitan untuk membeli dari masyarakat akan terjadi, sehingga pembajakan produk menjadi alternatif pihak lain untuk memenuhi permintaan konsumen.
4. Perlindungan Hukum dalam Ekonomi Kreatif selayaknya segera dibuat, tidak hanya mengandalkan produk hukum terdahulu yang kurang mengena dengan kebutuhan aspek hukum Ekonomi Kreatif saat ini, aspek hukum dibutuhkan, karena Indonesia adalah negara hukum. Aspek hukum HKI menjadikan rangsangan bagi perealisasi ide untuk terus berkarya, karena merasa terlindungi dan dihargai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrillya, M. (2017). *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Provinsi Lampung Nomor Kep-004/MUI-LPG/KF/VIII/2010 tentang Hukum Menutup Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Aidiyah, F. (2013). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Amin, M. (2010). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Arikunto, S. (1991). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- AS, Susiadi. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: FS IAIN Raden Intan Lampung.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Aliyy (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Perdagangan RI. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Jakarta: Departemen Perdagangan RI.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah*. Bandar Lampung: FS IAIN Radn Intan Lampung.



Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Idris, K. (2008). *Ekspresi Kreatif (Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Kamar Dagang dan industri Indonesia.

Khairandy, R. (2014). *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII.

Listiani. (2017). *Motivasi Siswi Dalam Mengenakan Busana Muslimah di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat*. Bandar Lampung: FTK UIN Raden Intan Lampung.

Mahmudah, S. (2016). *Historisitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, A. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Musyafa', M. (2013). Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad* , Vol. V. No. 1.

Narbuko, C. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nashr Farid Muhammad Washil, d. A. (2013). *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.

Nasir. (1985). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nasution, R. J. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Penerbit Erlangga. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. [www.nulisbuku.com](http://www.nulisbuku.com).

Quraisy, M. (2011). Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Muqtasid*, Vol. 2 No. 1.

Rumbekwan, R. G. (2016). Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 3.

Rumbekwan, R. G. (2016). Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 3.

S., N. (1998). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Saidin, O. H. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Savitrie, D. (2008). *Pola Perilaku Pembelian Produk Fashion pada Konsumen Wanita (Sebuah Studi Kualitatif pada Mahasiswi FE UI dan Pengunjung Butik N.y.l.a)*. Jakarta: FE UI.

Subekti, d. T. (2014). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Weboek)*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.

Sudjana, N. (1991). *Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru.

Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

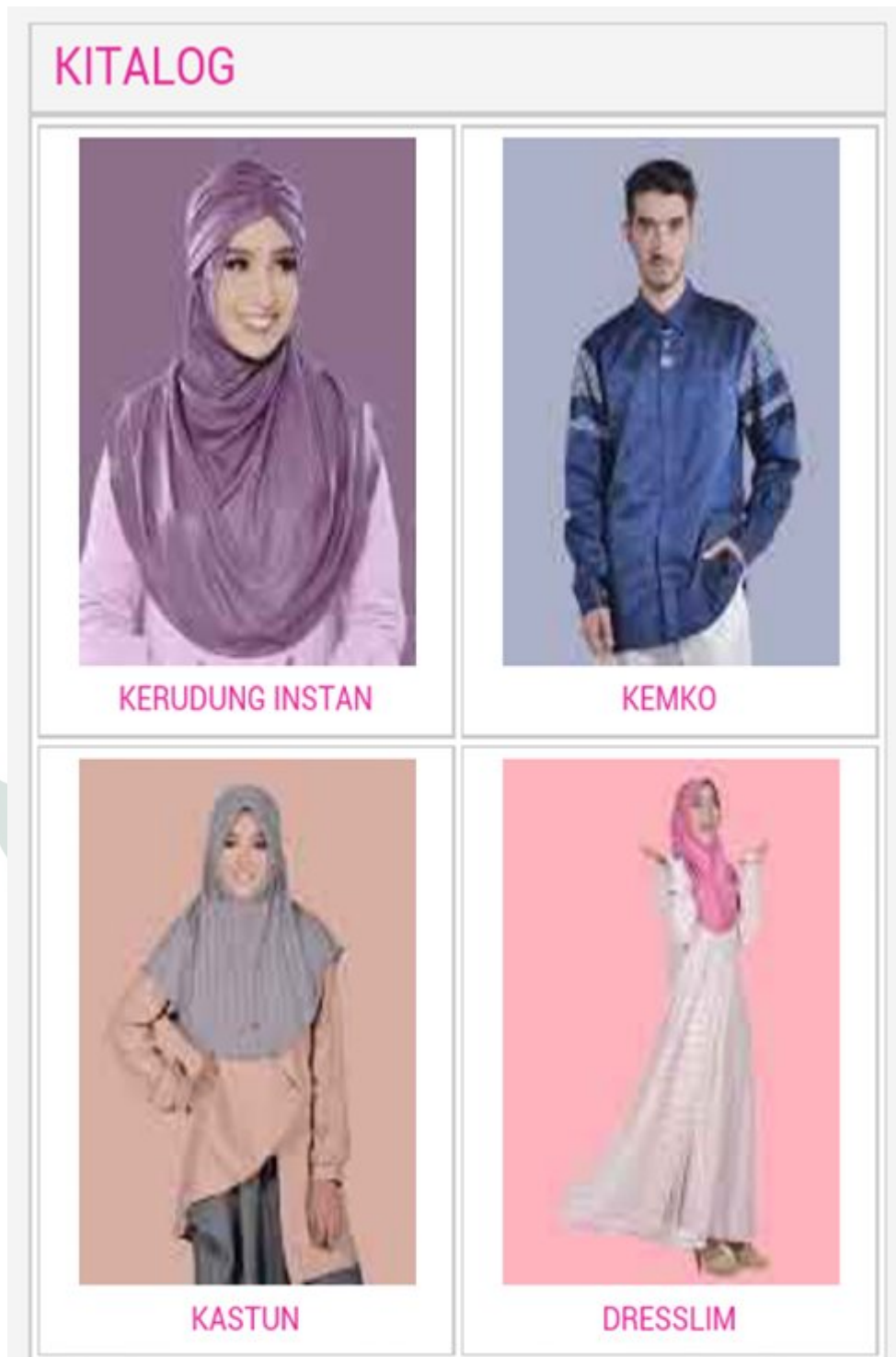
Suhrawardi K Lubis, d. F. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal, A. (2013). *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Referensi Website:

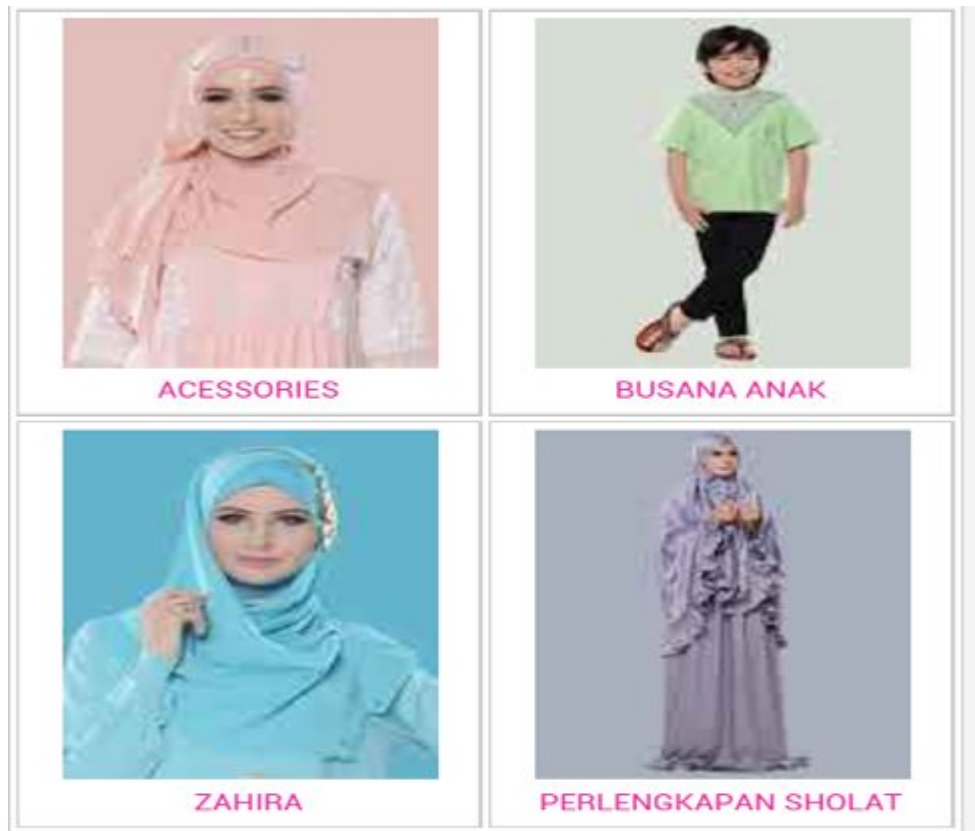
1. [https:// www.rabbani.co.id](https://www.rabbani.co.id), diakses tanggal 14 Mei 2018.
2. <https://www.pikiran-rakyat.com.2016/11/10>, diakses pada 14 Mei 2016.
3. <https://www.rabbanimallonline.com>, diakses tanggal 26 Mei 2018.
4. <http://www.bekraf.go.id/berita.com>, diakses 27 Juni 2018.
5. <https://bplawyers.co.id/2018/02/07>, diakses pada 27 Juni 2018.





Gambar 1.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> <https://www.rabbanimallonline.com>, diakses tanggal 26 Mei 2018.



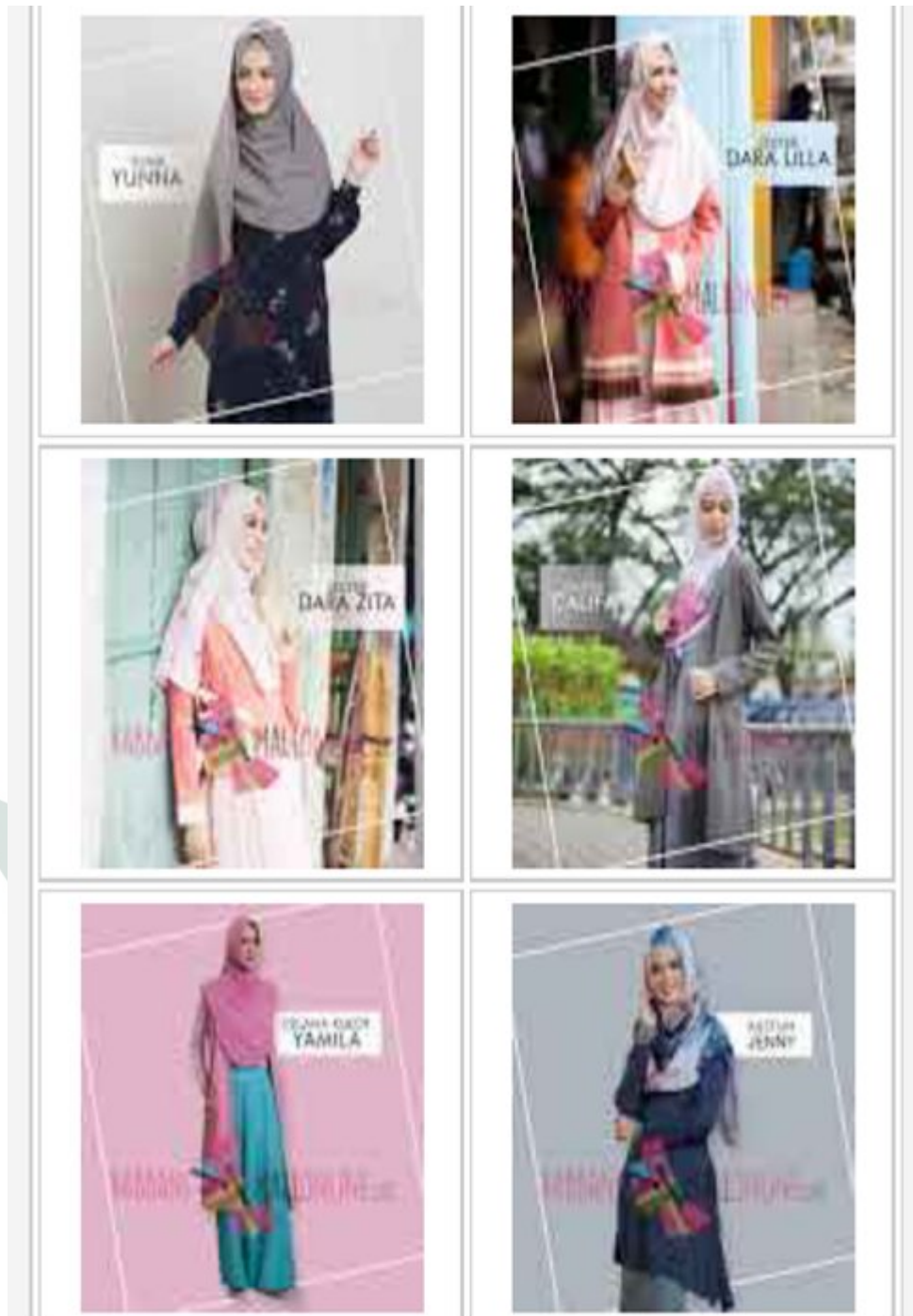
Gambar 2.<sup>2</sup>

  			
	<b>OFFICE</b> Jl. Citarum no.20A Bandung - Jawa Barat Indonesia Phone: +62 022 27234254	<b>INFORMATION</b> Info Biro Info Kemitraan Info Member Info KOMPENI	<b>OUR LINK</b> Profil Rabbani Lokasi Outlet Kontak Kami

Gambar 3.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> <https://www.rabbanimallonline.com>, diakses tanggal 26 Mei 2018.

<sup>3</sup> <https://www.rabbanimallonline.com>, diakses tanggal 26 Mei 2018.



Gambar 4.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> <https://www.rabbanimallonline.com>, diakses tanggal 26 Mei 2018.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl.Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Telp (0721) 703260*

**BLANKO KONSULTASI**

NAMA : Ela Novita Sari  
NPM : 1421030015  
Jurusan : Mu'amalah  
Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Frenk, S.E.I., M.Si.  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA SUBSEKTOR  
EKONOMI KREATIF MENGENAI DESAIN FESYEN  
BUSANA

No	Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf pembimbing	
			I	II
1	11 Juni 2017	Perbaikan Proposal Skripsi menurut catatan oleh Pembimbing II		
2	20 November 2017	Perbaikan BAB I menurut catatan oleh Pembimbing II		
3	05 Desember 2017	ACC BAB I oleh Pembimbing II untuk dilanjutkan ke Pembimbing I		
4	20 Desember 2017	Perbaikan Judul "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pada Subsektor Ekonomi Kreatif Mengenai Desain Fesyen Busana Muslimah dan Busana Non Muslimah", menjadi "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Subsektor Ekonomi Kreatif mengenai Desain Fesyen Busana Muslimah dan Busana Non Muslimah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1.		



		MUNAS VII/MUI/15/2005)” oleh Pembimbing I		
5	22 Januari 2018	ACC BAB I Pembimbing I kembali ke Pembimbing II		
6	22 Januari 2018	Lanjut BAB II-V oleh Pembimbing II		
7	17 April 2018	ACC Pembimbing II untuk dilanjutkan ke Pembimbing I		
8	24 April 2018	Perbaiki BAB I-V tentang teknis kepenulisan dan BAB III penambahan contoh kasus		
9	26 April 2018	Mengonsep pertanyaan yang akan diajukan ke Toko Busana Muslimah Rabbani bersama Pembimbing I		
10	30 April 2018	Belajar standar pembuatan Footnote dan standar Daftar Pustaka bersama Pembimbing I		
11	14 Mei 2018	Perbaiki teknis penulisan dan penambahan Laporan Data pada BAB III oleh Pembimbing I		
12	08 Juni 2018	Perbaiki BAB IV untuk dianalisis pembacaan data di BAB III berdasar teori BAB II oleh Pembimbing I		
13	26 Juni 2018	Perbaiki BAB IV menghilangkan kata “dalam” pada poin analisis A yang berbunyi “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, <b>menjadi</b> “Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”. Dan kata dalam pada poin B yang berbunyi “Perlindungan Hukum Subsektor Ekonomi Kreatif Desain Fesyen Busana Muslimah dan Busana Non Muslimah dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/16/2005 tentang		

		Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, <b>menjadi</b> “Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perlindungan Hukum Subsektor Ekonomi Kreatif Desain Fesyen Busana Muslimah dan Busana Non Muslimah”, oleh Pembimbing I		
14	27 Juni 2018	BAB 1-V ACC untuk di Munaqosyahkan		

Pembimbing I

Bandar Lampung, 27 Juni 2018  
Pembimbing II

**Dr. Siti Mahmudah, S. Ag., M. Ag.**  
**NIP.196706041997032004**

**Frenki, S.E.I., M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**

